

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

tahun 2025



3.41271

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu unsur fungsi pelayanan umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap aparat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Sekanjutnya laporan ini juga menjadi masukan dan bahan penilaian bagi Bupati Banjar.

Di tetapkan : Martapura
Pada Tanggal : 28 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar

Akhmad Bayhaqie, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690909 199703 1 013



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025-2030 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 1 sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada 1 sasaran strategis masuk pada kategori sangat baik dengan nilai rata – rata 106.61%

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan pembangunan serta pengendalian dampak lingkungan di daerah adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap dampak lingkungan di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp139.739,562,371,- untuk melaksanakan 16 program, 29 Kegiatan dan 78 sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp127.277,821,899,- (91.08%). Adapun realisasi anggaran pada program utama adalah sebesar Rp109.370,331,938,- (97.68%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp117.105,102,645,- sedangkan realisasi belanja langsung program pendukung Rp6.252,587,429,- (86.79%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk Rp7.204,484,726 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp11.654,902,532,- (75.53%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp15.429,975,000,-

Bab I

Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
- Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan

- Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kepada Bupati;
- Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

B. Tugas dan Fungsi

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang Perumahan dan Permukiman serta Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam bidang Perumahan dan Permukiman serta Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah.

2. Fungsi

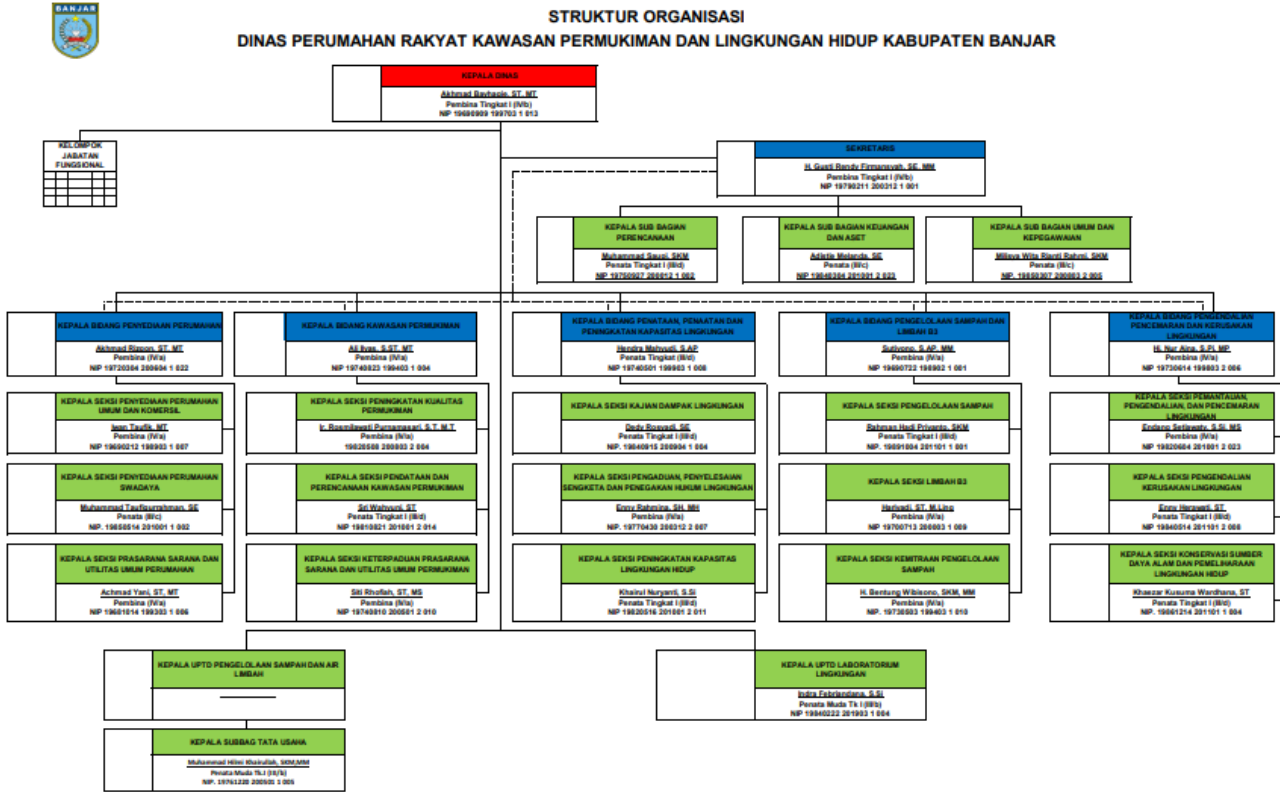
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Menyelenggarakan kegiatan bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pengendalian pecemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan

- peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah daerah di bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - i. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;
 - j. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k. Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan UPTD;
 - l. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dasar hukum
- 1) Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 7) Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 32/PRT/M/2016;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah) Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
- 9) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
- 10) Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
- 12) Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4)
- 13) Peraturan Bupati Banjar nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan bupati banjar nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
- 14)Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

4. Struktur Organisasi



5. Kepegawaian

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan; dan
3. Subbagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Penyediaan Perumahan terdiri dari:

1. Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil;
2. Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya, dan
3. Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:

1. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman;
2. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; dan
3. Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Bidang

- e. Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. Seksi Kajian dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah.
 - g. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan sampah dan limbah B3
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
- C. Isu Strategis
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dalam urusan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan urusan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam urusan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah

sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (Unresolved Matters) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan, sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara, informasi dan edukasi masyarakat;
2. Kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan taman dan biomasa, kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
3. Jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah, mutasi pegawai yang sudah terlatih dan kurangnya pejabat penyidik pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
4. Terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan hidup;
5. Faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan memicu kebakaran;
6. Sulitnya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH;
7. Belum ada regulasi yang mengikat dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh sehingga penanganan hanya bersifat on the spot;
8. Berkurangnya lahan untuk bervegetasi;
9. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dan kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LkjIP, Tugas pokok dan fungsi (Struktur Organisasi), permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun 2025 dan realisasi anggaran tahun 2025 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,59	71,39	
		Indeks Infrastruktur	87.5	87.94	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	64,15	71,96	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,62	71,21	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,5	70,73	
	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	52,60%	53,98%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45	82,81	

B. Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan	$\sum(\text{persentase status IP air} \times \text{bobot})$	71.96
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perbandingan nilai rata-rata tahunan parameter SO2 dan NO2 terhadap baku mutunya	$100 - ((50 \div 0,9) \times (\text{PU} - 0,1))$ Note : PU adalah Indeks Pencemar Udara PU = 50% INDEKS SO2 + 50% INDEKS NO2	71.21
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Data kualitas lahan yang menjadi tupoksi Pemerintah Daerah yaitu data Taman Kehati, RTH, dan Tutupan vegetasi relevan lainnya yang memiliki SK penetapan dan telah didelineasi, selebihnya perolehan datanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat	$\text{IKL} = 100 - ((84,3 - ((\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK}) \times 100)) \times 50/54,3)$ IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas Tutupan Hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung. Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan LW : Luas Wilayah DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal Pada Lahan Gambut	70.73
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	Permukiman Layak Huni adalah permukiman yang memenuhi standar pelayanan PSU, yang meliputi Rumah Layak Huni yang didukung Akses jalan, Drainase Lingkungan, Air Minum, Sanitasi,	$(\text{Jumlah Permukiman Layak Huni} / \text{Jumlah Permukiman Kabupaten}) \times 100\%$	53.98

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			Pengelolaan Persampahan, dan Penerangan Jalan Umum		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian kinerja akuntabilitas instansi pemerintah daerah yang dievaluasi setiap tahun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan tingkat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.	Skor/nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah , dalam rentang 0–100 (dengan kategori: A, BB, B, CC, C).	82.81

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

C. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$\sum(\text{persentase status IP air} \times \text{bobot})$	71.96	Indeks	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1,547,805,900	Kepala Dinas
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$100 - ((50 \div 0,9) \times (\text{PU} - 0,1))$ Note : PU adalah Indeks Pencemar Udara PU = 50% INDEKS SO2 + 50% INDEKS NO2	71.21	Indeks	Program Pengelolaan Persampahan	Rp44,347,021,716	Kepala Dinas
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$\text{IKL} = 100 - ((84,3 - ((\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK}) \times 100)) \times 50/54,3)$ IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas Tutupan Hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung. Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan LW : Luas Wilayah DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal Pada Lahan Gambut	70.73	Indeks	Program Pengendalian dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp132,945,000	Kepala Dinas
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp357,660,500	Kepala Dinas
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp126,784,700	Kepala Dinas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp132,928,700	Kepala Dinas
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kaerifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp120,013,600	Kepala Dinas
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp223,942,720	Kepala Dinas
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp17,093,014,015	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	(Jumlah Permukiman Layak Huni/ Jumlah Permukiman Kabupaten) x 100%	53.98	%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp41,728,396,812	Kepala Dinas
						Program Pengembangan Perumahan	Rp345,712,500	Kepala Dinas
						Program Kawasan Permukiman	Rp7,468,055,782	Kepala Dinas
						Program Perumahan dan Kawasan	Rp3,480,820,700	Kepala Dinas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
						Permukiman Kumuh		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor/nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah , dalam rentang 0–100 (dengan kategori: A, BB, B, CC, C).	82.81	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp22,634,459,726	Kepala Dinas
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	(Jumlah Titik Pantau Badan Air Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Baku Mutu ÷ Jumlah Total Titik Pantau Badan Air) x 100%	100	%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1,547,805,900	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	(Jumlah Titik Udara Ambien Yang Dilakukan Uji Mutu Memenuhi Baku Mutu ÷ Jumlah Titik Pantau Udara Ambien) x 100%	100	%			
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	Jumlah Sampah yang dibuang ke TPA : Jumlah Timbulan sampah Kabupaten	22.58	%	Program Pengelolaan Persampahan	Rp44,347,021,716	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	(Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik s.d. tahun 2024 + Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik tahun ke n) / Jumlah Pelaku Usaha yang Berpotensi sebagai Penghasil Limbah B3 * 100%	46.43	%	Program Pengendalian dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp132,945,000	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	(Total Pelaku Usaha Yang Diawasi-Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi) x 100 %	100	%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp357,660,500	Kepala Bidang Penataan Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp126,784,700	Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	$\text{Persentase evaluasi lingkungan} = \frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi yang lengkap}}{\text{Total dokumen evaluasi yang wajib dibuat}} \times 100\%*$	100	%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp132,928,700	Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Sasaran yang Mengikuti Kegiatan}}{\text{Total Masyarakat Sasaran}} \times 100\%$	100	%	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kaerifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp120,013,600	Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp223,942,720	Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Kecamatan Martapura Kota}} \times 100\%$	0.40	%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp17,093,014,015	Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	17.09	Ha			Kepala Bidang Penataan Penataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	$\left(\frac{\text{Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan} + \text{Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan Kumuh}}{\text{Jumlah RT di Kabupaten Banjar}} \right) \times 100\%$	54.60	%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp41,728,396,812	Kepala Bidang Penyedia Perumahan
						Program Kawasan Perumahan	Rp7,468,055,782	Kepala Bidang Kawasan Perumahan
						Program Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh	Rp3,480,820,700	Kepala Bidang Penyedia Perumahan
13	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\left(\frac{\text{Jumlah Rumah di Kab. Banjar} - \text{Jumlah RTL} + \text{Jumlah RTLH yang ditangani}}{\text{Jumlah Kab Banjar}} \right) \times 100$	76.95	%	Program Pengembangan Perumahan	Rp345,712,500	Kepala Bidang Penyedia Perumahan
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	$\left(\frac{\text{Total Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah}}{\text{Target Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah}} \right) \times \text{Nilai Penimbang}$	81	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp22,634,459,726	Sekretaris
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	Parameter Air yang Dipantau (38)	38	Parameter	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp1,280,586,300	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, UPTD-Laboratorium Lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	Parameter Udara yang Dipantau (3)	3	Parameter			Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, UPTD-Laboratorium Lingkungan
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas			Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	Laporan			Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp187,694,600	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp79,525,000	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
19	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	((Jumlah Total lembaga pengelolaan sampah yang terbentuk-jumlah Total lembaga sampah yang belum aktif)/Jumlah Total lembaga sampah keseluruhan) x 100 %	50	%	Pengelolaan Sampah	Rp32,534,760,236	Kepala Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah
20	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	(Jumlah Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah / Jumlah rumah tangga sasaran) x 100%	50	%			Kepala Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	(Jumlah Sampah Yang Dikurangi / Jumlah Timbulan Sampah) x 100%	32.75	%			Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
22	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	54750	Ton	Pengelolaan Sampah (UPTD-Persampahan)	Rp11,812,261,480	Kepala UPTD-Persampahan
23	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang Telah Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis s.d. tahun n / Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Terdata * 100	46.43	%	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp132,945,000	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
24	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	(Jumlah Dokumen Persetujuan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Perundangan dibagi Jumlah Dokumen Yang dikeluarkan Persetujuan Lingkungannya) x 100 %	100	%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp357,660,500	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
25	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	(Total Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan/Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan) x 100 %	100	%			Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
26	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	(Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti / Total Pengaduan Yang Masuk) x 100%	100	%	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp126,784,700	Kepala Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
27	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan P	Persentase Dokumen Perlindungan	Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	%	Rencana Perlindungan dan	Rp132,928,700	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
	engelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	gan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota Yang Terencana	(RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana			Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	1. Dokumen Profil 2. Peta Wilayah Adat 3. Peraturan Daerah Terkait MHA 4. Peraturan Bupati Banjar Terkait Tata Cara Pengakuan 5. Peraturan Bupati Banjar Penetapan Masyarakat Hukum Adat	1	Kelompok	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp120,013,600	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
29	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	Jumlah Sekolah yang terbina pada tahun (n)/ Jumlah Sekolah yang direncanakan mendapatkan pembinaan pada tahun (n)*100%	100	%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp223,942,720	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
30	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati	7.82	Ha	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp17,093,014,015	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan
31	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	(Ruang Terbuka Hijau Yang Dipelihara/Total Ruang Terbuka Hijau) x 100%	100	%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan
32	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	(RTH Terbangun Sesuai Rencana dan Terpelihara/Ruang Terbuka Hijau yang Telah Direncanakan) x 100%	100	%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	(Jumlah Jalan Lingkungan Permukiman Optimal / Total Jalan Lingkungan Permukiman) x 100%	26.87	%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp41,728,396,812	Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
34	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	(Jumlah Drainase Permukiman Optimal / Total Drainase Permukiman) x 100%	22.30	%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
35	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	Jumlah Dokumen Kerja sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan yang dilaksanakan	20	Dokumen	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kepala Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
36	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahtherimakan	(Jumlah PSU Perumahan yang telah diserahkan / Jumlah PSU Perumahan keseluruhan) x 100	3.66	%	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	(Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100	100	%	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp188,466,000	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya
38	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	(Perumahan yang Sedang Dibangun Sesuai dengan Siteplan / Total Perumahan yang Sedang Dibangun) / 100%	100	%	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp157,246,500	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil
39	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Rp693,000,785	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
						Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
40	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	(Jumlah Jalan Lingkungan Permukiman Optimal / Total Jalan Lingkungan Permukiman) x 100%	26.87	%	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp6,775,054,997	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
41	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	(Jumlah Drainase Permukiman Optimal / Total Drainase Permukiman) x 100%	22.30	%			Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
42	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	(Jumlah RTLH yang ditangani / Jumlah RTLH Kab Banjar) x 100 %	0.89	%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp3,480,820,700	Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya
43	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	(Jumlah Masyarakat Sasaran Yang Memahami Tujuan & Maksud Kegiatan / Jumlah Masyarakat Sasaran Yang Hadir Dalam Kegiatan) x 100%	35	%			Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
44	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	(Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun / Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditargetkan) x 100%	100	%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp81,538,400	Kepala Sub bagian Perencanaan
45	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	(Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun / Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Di Targetkan) x 100%	100	%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp15,770,611,300	Kepala Sub bagian Keuangan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3		5	7	8	9	10
46	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	(Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun / Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Di Targetkan) x 100%	100	%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp3,499,700	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
47	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	(Dokumen Kepegawaian pada Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu) X 100%	100	%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp140,373,800	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
48	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	(Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah) X 100%	100	%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1,180,231,000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
49	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	(Dokumen Laporan Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) X 100%	100	%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1,169,968,000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
50	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	(Laporan jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi) X 100%	100	%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3,097,008,526	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
51	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	(Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan) X 100%	100	%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1,191,229,000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi tujuan

Realisasi kinerja per indikator kinerja pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target Tahunan	Satuan	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.39	Indeks	78.20	109.54
		Indeks Infrastruktur	87.94	Indeks	86.91	98.83
		Indeks Kualitas Air (IKA)	71.96	Indeks	74.92	104.11
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	71.21	Indeks	84.95	119.30
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	70.73	Indeks	71.36	100.89
		Persentase Permukiman Layak Huni	53.98	Persen	54.12	100.26
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.81	Nilai	76.82	92.77

Sumber : Laporan Emonev Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan lingkungan hidup mengampu 7 indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan hidup dengan target tahun 2025 sebesar 71.39 indeks dan terealisasi 78.20 indeks dengan persentase capaian sebesar 109.54% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
2. Indeks Infrastruktur dengan target tahun 2025 sebesar 87.94 Indeks dan terealisasi 86.91 indeks dengan persentase capaian 98.83% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pelayanan infrastruktur daerah telah berjalan optimal, namun masih diperlukan peningkatan pada beberapa sektor infrastruktur pendukung.
3. Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target tahun 2025 sebesar 71.96 indeks dan terealisasi 74.92 indeks dengan persentase capaian 104.11% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan

kualitas air berada dalam kategori baik sebagai hasil pengawasan dan pengendalian pencemaran sumber air.

4. Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target tahun 2025 sebesar 71.21 indeks dan terealisasi 84.95 indeks dengan persentase capaian 119.30% pada tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan kondisi kualitas udara yang semakin baik, didukung oleh pengendalian emisi dan pengurangan sumber pencemar udara.
5. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target tahun 2025 sebesar 70.73 indeks dan terealisasi 71.36 indeks dengan persentase capaian 100.89% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan lahan dan ruang terbuka hijau berjalan sesuai rencana.
6. Persentase perumahan layak huni dengan target tahun 2025 sebesar 53.98% dan terealisasi sebesar 54.12% dengan persentase capaian 100.26% . Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman.
7. Nilai sakip perangkat daerah dengan target tahun 2025 senilai 82.81 dan terealisasi senilai 76.82 dengan persentase capaian 92.77% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja telah berjalan baik, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2. Membandingkan antara target dan realisasi sasaran kinerja

Realisasi kinerja per indikator kinerja pada tabel berikut ini

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	71.96	Indeks	74.92	104.11	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	71.21	Indeks	84.95	119.3	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	70.73	Indeks	71.36	100.89	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	53.98	%	54.12	100.26%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82.81	Nilai	76.82	92.77%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	%	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	100	%	100	100	Sangat Tinggi
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	22.58	%	27.25	79.31	Tinggi
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	46.43	%	49.29	106.15	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	%	100	100	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100	%	100	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	%	100	100	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	0.40	%	0.4	100	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	17.09	Ha	17.09	100	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	54.60	%	54.74	100.26%	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
13	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	76.95	%	76.86	99.88%	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	81	Nilai	89.25	110.19%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	38	Parameter	38	100	Sangat Tinggi
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	3	Parameter	3	100	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas	18	100	Sangat Tinggi
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	Laporan	1	100	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas	18	100	Sangat Tinggi
19	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	50	%	77.98	155.96	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	50	%	34.8	69.60	sedang
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	32.75	%	33.16	101.25	Sangat Tinggi
22	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	54750	Ton	54020	98.67	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	46.43	%	49.29	106.16	Sangat Tinggi
24	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	100	%	100	100	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	100	%	100	100	Sangat Tinggi
26	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100	%	100	100	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
27	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100	%	100	100	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	1	Kelompok	1	100	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	100	%	100	100	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	7.82	Ha	7.82	100	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100	%	100	100	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	100	%	100	100	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	%	29.8	110.90%	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	%	21.94	98.39%	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	20	Dokumen	20	100%	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	3.66	%	3.66	100%	Sangat Tinggi
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
39	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	4	Dokumen	4	100%	Sangat Tinggi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	2	3	5	6	7	8	9
40	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	%	29.8	110.90%	Sangat Tinggi
41	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	%	21.94	98.39%	Sangat Tinggi
42	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	0.89	%	0.47	52.81%	Rendah
43	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	35	%	35	100%	Sangat Tinggi
44	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
45	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
46	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
47	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
48	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
49	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
50	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	%	100	100%	Sangat Tinggi
51	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	%	100	100%	Sangat Tinggi

narasi/keterangan tentang hasil capaian target kinerja dari sasaran strategis (sasaran kepala perangkat daerah) sampai sasaran kinerja level ess IV per indikator secara lengkap.

1. Capaian kinerja sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan** diukur dengan indikator 3 (tiga) indikator yaitu :
 - **Indeks Kualitas Air** dengan target indikator pada tahun 2025 sebesar 71.96 indeks dan terealisasi sebesar 74.92 indeks dengan persentase capaian 104.11%. Indikator ini memenuhi kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan kondisi kualitas air yang semakin baik sebagai hasil pengendalian pencemaran dan pengawasan sumber daya air secara berkelanjutan.
 - **Indeks Kualitas Udara** dengan target indikator pada tahun 2025 sebesar 71.21 indeks dan terealisasi sebesar 84.95 indeks dengan persentase capaian 119.30%. Indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi. Hal ini menggambarkan kondisi kualitas udara daerah yang berada pada tingkat baik, didukung oleh upaya pengurangan emisi dan pengendalian sumber pencemar udara.
 - **Indeks Kualitas Lahan** dengan target indikator pada tahun 2025 sebesar 70.73 indeks dan terealisasi 71.36 Indeks dengan persentase capaian 100.89% memenuhi kriteria sangat tinggi. Pencapaian ini mencerminkan pengelolaan lahan yang semakin optimal melalui konservasi lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
2. Capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Permukiman** diukur dengan indikator berupa Persentase Permukiman Layak Huni. Adapun target indikator ini sebesar 53.98% dengan realisasi 54.12% atau capaian 100.26%. Capaian itu di dapat dengan rumus Jumlah Permukiman Layak Huni dibagi Jumlah Permukiman Kabupaten dikali 100% dengan perhitungan $((760+17+5)/1445) \times 100$. 17 Unit dari paket pekerjaan Bidang Perumahan dan 5 Paket Pekerjaan Bidang Permukiman. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Permukiman Layak Huni maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria Sangat Tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas

permukiman telah berjalan efektif dalam mendukung tersedianya kawasan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat.

3. Sasaran kinerja **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** diukur dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah, Target kinerja pada indikator ini senilai 82.81 dan realisasi 76.82 dengan persentase capaian 92.77% dengan kriteria sangat tinggi. Secara umum Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup optimal, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja guna mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Sasaran kinerja **Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
 - **Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu** dengan indikator pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas badan air pada lokasi pemantauan telah memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air, pengawasan kualitas lingkungan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil capaian tersebut, indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.
 - **Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu** dengan indikator pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas udara ambien pada seluruh lokasi pemantauan berada dalam kondisi baik dan telah memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran udara, pemantauan kualitas udara secara berkala, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan hasil tersebut, indikator ini memperoleh kategori **Sangat Tinggi**.

5. Sasaran kinerja **Menurunnya sampah yang dibuang ke TPA** diukur dengan indikator persentase sampah dibuang ke TPA. Target kinerja pada kinerja sasaran ini sebesar 22.58% dan terealisasi sebesar 27.25% dengan persentase capaian 79.31% formulasi perhitungan pada indikator dihitung dengan rumus **Jumlah Sampah yang dibuang ke**

TPA : Jumlah Timbulan sampah Kabupaten

Jumlah sampah yang dibuang ke TPA Cahaya Kencana : 35.558,5

Jumlah Timbulan sampah kabupaten pada tahun 2025 : 130.468,2

$$35.558,5/130.468,2 \times 100 = 27.25\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya optimalisasi pengelolaan sampah melalui peningkatan kegiatan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, daur ulang, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Indikator ini memenuhi kriteria Tinggi

6. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3** dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 46.43% dan terealisasi sebesar 49.29% dengan persentase capaian 106.15% capaian tersebut didapat dari perhitungan (Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik s.d. tahun 2024 + Jumlah Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik tahun ke n) / Jumlah Pelaku Usaha yang Berpotensi sebagai Penghasil Limbah B3 * 100% (50+19)/140*100. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis, pengawasan, serta pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan pelaporan limbah sesuai regulasi lingkungan hidup. Indikator ini mendapat predikat sangat tinggi.
7. Sasaran kinerja **Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan** dengan indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian

100% capaian tersebut didapat dari perhitungan (Total Pelaku Usaha Yang Diawasi-Total Pelaku Usaha Yang Taat) / Total Pelaku Usaha Yang Di Awasi) x 100 %. Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah pelaku usaha yang taat terhadap total pelaku usaha yang diawasi, kemudian dikalikan 100%. Hasil pengawasan menunjukkan tidak terdapat pelaku usaha yang tidak taat, sehingga persentase ketaatan mencapai target secara penuh, tingkat ketaatan tersebut mencerminkan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan dokumen dan kewajiban lingkungan hidup secara baik, antara lain pemenuhan persetujuan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penyampaian laporan pelaksanaan dokumen lingkungan, serta pengendalian dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar. Indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi.

8. **Sasaran kinerja meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup** dengan indikator kinerja persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup yang tersedia. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% capaian tersebut didapat dari perhitungan $\text{Persentase evaluasi lingkungan} = (\text{Jumlah dokumen evaluasi yang lengkap} / \text{Total dokumen evaluasi yang wajib dibuat}) \times 100\%$. Seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketersediaan dokumen lingkungan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas tata kelola perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Indikator mendapat predikat sangat tinggi.
9. **Sasaran kinerja Meningkatnya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan** dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% capaian tersebut didapat melalui perhitungan $(\text{Jumlah Masyarakat Sasaran yang Mengikuti Kegiatan} / \text{Total Masyarakat Sasaran}) \times 100\%$. Hasil pengukuran

menunjukkan bahwa seluruh masyarakat sasaran telah berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup yang dilaksanakan, Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan lingkungan hidup berjalan efektif sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup ramah lingkungan serta Terbangunnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas lingkungan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Indikator ini mendapat predikat sangat tinggi.

10. Sasaran kinerja **Meningkatnya Tutupan Lahan** yang diukur dengan Persentase Tutupan Lahan memiliki target sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di wilayah daerah tetap terjaga sesuai dengan perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Tutupan vegetasi dan kawasan hijau tetap terpelihara sehingga mendukung fungsi ekologis, seperti resapan air, pengendalian erosi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, Upaya rehabilitasi dan pemeliharaan lahan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Indikator ini memperoleh kriteria Sangat Tinggi.
11. Sasaran kinerja **Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau** diukur dengan indikator Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau memiliki target 17.09 Ha dengan Realisasi 17.09 Ha dan capaian kinerja indikator ini sebesar 100%. menunjukkan bahwa penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam pembangunan daerah, Keberadaan RTH berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung fungsi resapan air dan kualitas udar. Indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi.
12. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kelengkapan PSU** Permukiman diukur dengan indikator berupa Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal. Adapun target indikator ini sebesar 54.60% dengan realisasi 54.74% atau capaian 100.26%. Sasaran Kinerja ini diampu oleh 3 Program yaitu Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU. Capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus (Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Perumahan + Jumlah RT yang Memenuhi Kelengkapan PSU Minimal di Permukiman Kumuh / Jumlah RT di Kabupaten Banjar) x 100% dengan perhitungan $(769+(17+5))/1445 \times 100\%$. 17 dari paket pekerjaan Bidang Kawasan Perumahan dan 5 dari paket pekerjaan Bidang Permukiman. Dengan demikian, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas dasar pada kawasan permukiman, baik di perumahan maupun di kawasan permukiman kumuh, sehingga mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih layak dan berkelanjutan. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria Sangat Tinggi.

13. Sasaran kinerja **Meningkatnya Rumah Layak Huni** diukur dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni. Adapun target indikator ini sebesar 76.95% dengan realisasi 76.86% atau capaian 99.88%. capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus $((\text{Jumlah Rumah di Kab. Banjar} - \text{Jumlah RTL} + \text{Jumlah RTLH yang ditangani}) / \text{Jumlah Kab Banjar}) \times 100$ dengan perhitungan $(172931-40213+189)/172931 \times 100\%$. Jumlah RTLH yang ditangani 189 unit berasal dari 119 penanganan dari DPRKPLH, 39 Provinsi dan 31 BSPS. Secara umum, capaian ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui penanganan RTLH, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara lebih signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan persentase rumah layak huni di Kabupaten Banjar. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Rumah Layak Huni maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria Sangat Tinggi.

14. Sasaran **meningkatnya kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah** diukur dengan indikator Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah diukur dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Adapun target indikator ini diukur dengan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Target kinerja pada indikator ini senilai 81 dan terealisasi senilai 89.25 dengan persentase capaian 110.19%. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Indikator ini memperoleh predikat sangat tinggi

15. Sasaran kinerja **meningkatkan pemantauan kualitas Air dan Udara** diampu oleh 2 indikator yaitu:

- **Parameter air yang dipantau** memiliki target sebanyak 38 parameter dan terealisasi sebanyak 38 parameter dengan persentase capaian 100%. Pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampel air pada titik lokasi yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengujian laboratorium sesuai standar metode pengujian yang berlaku. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, seluruh 38 parameter kualitas air berhasil dipantau dan diuji. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan kualitas air telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan, sehingga data mutu air yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi lingkungan, pengendalian pencemaran air, serta bahan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Indikator ini telah memenuhi kriteria sangat tinggi.
- **Parameter Udara ambien yang dipantau** memiliki target sebanyak 3 parameter dan terealisasi sebanyak 3 parameter dengan persentase capaian 100%. Kegiatan pemantauan dilaksanakan melalui pengambilan sampel udara pada lokasi pemantauan yang telah ditentukan, terutama pada kawasan permukiman, pusat aktivitas masyarakat, maupun area yang berpotensi mengalami pencemaran udara. Selanjutnya, sampel udara dilakukan pengujian menggunakan peralatan pemantauan kualitas udara atau melalui analisis laboratorium sesuai metode dan standar yang berlaku. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan,

seluruh **3 parameter udara ambien telah berhasil dipantau dan dianalisis**, sehingga realisasi capaian mencapai **100%** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan kualitas udara telah berjalan sesuai perencanaan dan mampu menyediakan data kualitas udara yang akurat sebagai bahan evaluasi kondisi lingkungan serta dasar pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran udara di daerah. Indikator ini telah memenuhi kriteria sangat tinggi.

16. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim** diukur dengan indikator Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina memiliki target sebanyak 18 komunitas dan terealisasi 18 komunitas dengan persentase capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas Kampung Iklim telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, Program pembinaan Kampung Iklim berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan, Kegiatan pembinaan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian sampah, konservasi energi, penghijauan, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi
17. Sasaran kinerja **Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca** dengan indikator Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca memiliki target 1 laporan dan terealisasi 1 laporan dengan persentase capaian 100%. Dokumen inventarisasi gas rumah kaca telah tersusun secara lengkap dan tepat waktu sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah, Laporan inventarisasi menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan mitigasi perubahan iklim serta evaluasi kinerja pengurangan emisi di daerah, Kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan data perubahan iklim semakin meningkat. memenuhi kriteria sangat tinggi.
18. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim** diukur dengan indikator Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina memiliki target sebanyak 18 komunitas dan terealisasi 18 komunitas dengan persentase capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas

Kampung Iklim telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, Program pembinaan Kampung Iklim berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan, Kegiatan pembinaan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian sampah, konservasi energi, penghijauan, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi

19. Sasaran kinerja **Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah** dengan indikator Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif memiliki target 50% dan terealisasi 77.98% dengan persentase capaian 155.96% capaian tersebut didapat melalui perhitungan $((\text{Jumlah Total lembaga pengelolaan sampah yang terbentuk} - \text{jumlah Total lembaga sampah yang belum aktif}) / \text{Jumlah Total lembaga sampah keseluruhan}) \times 100 \%$ dan memenuhi kriteria sangat tinggi.
20. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah** dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah memiliki target 50% dan terealisasi 77.98% dengan persentase capaian 155.96 capaian tersebut didapat melalui perhitungan $(\text{Jumlah Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah} / \text{Jumlah rumah tangga sasaran}) \times 100\%$. Tingginya capaian kinerja ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber, pembinaan dan pendampingan bank sampah, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan dari kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga dengan hasil capaian tersebut indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi
21. Sasaran kinerja **Optimalnya Pengurangan Sampah** dengan indikator Persentase Sampah Yang Dikurangi memiliki target 32.75% dan realisasi 33.16% dengan persentase capaian 101.25% capaian tersebut didapat melalui perhitungan $(\text{Jumlah Sampah Yang Dikurangi} / \text{Jumlah Timbulan Sampah}) \times 100\%$. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa berbagai program pengurangan sampah telah berjalan secara

efektif, antara lain melalui penguatan peran bank sampah, penerapan pemilahan sampah dari sumber, kegiatan daur ulang, pengomposan sampah organik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan hasil tersebut indikator ini memenuhi kriteria sangat tinggi.

22. Sasaran kinerja **Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah** dengan indikator Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah memiliki target sebanyak 54750 ton dan terealisasi 54020 ton dengan persentase capaian 98.67% capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah yaitu angka rata-rata harian sampah yang masuk ke TPA per hari dikalikan dengan 365 hari $148 \text{ ton/hari} \times 365 \text{ hari} = 54020$ dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah telah berjalan dengan baik dan mampu menangani sebagian besar timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat. Kegiatan penanganan meliputi pengumpulan, pengangkutan, serta pemrosesan sampah di TPA sesuai dengan prosedur pengelolaan sampah yang berlaku.

23. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis** diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis memiliki target 46.43% dan terealisasi 49.29% dengan persentase capaian 106.16% capaian tersebut didapat melalui perhitungan Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang Telah Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis s.d. tahun n / Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Terdata * 100 $(50+19)/140*100$ dan termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Adapun gambaran secara umum pada Capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengelolaan Limbah B3, yang didukung oleh kegiatan pembinaan, sosialisasi regulasi lingkungan hidup, pendampingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

24. Sasaran kinerja **Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan** dengan indikator Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% capaian tersebut didapat melalui perhitungan (Jumlah Dokumen Persetujuan Lingkungan Yang Sesuai Dengan Perundangan dibagi Jumlah Dokumen Yang dikeluarkan Persetujuan Lingkungannya) x 100% dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa proses penyusunan, evaluasi, dan penerbitan dokumen persetujuan lingkungan telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai standar teknis maupun regulasi yang berlaku. Hal ini didukung oleh pelaksanaan verifikasi administrasi dan teknis, koordinasi antar bidang terkait, serta pembinaan kepada pelaku usaha dalam penyusunan dokumen lingkungan.
25. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha** dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% capaian tersebut didapat melalui perhitungan (Total Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan/Total Pelaku Usaha Yang Menjadi Target Pengawasan) x 100 % dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan lingkungan telah dilaksanakan secara optimal sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi lapangan, evaluasi dokumen lingkungan, pemantauan ketaatan pelaku usaha, serta tindak lanjut berupa pembinaan maupun penerapan sanksi administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan lingkungan hidup.
26. Sasaran kinerja **Meningkatnya Penanganan Pengaduan** dengan indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% capaian tersebut didapat melalui perhitungan (Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti / Total Pengaduan Yang Masuk) x 100% dan memenuhi kriteria sangat tinggi.

27. Sasaran kinerja **tersedianya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota** dengan indikator persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/kota yang terencana memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan lingkungan telah berjalan dengan baik melalui proses penerimaan, verifikasi, penelaahan, serta tindak lanjut lapangan terhadap setiap laporan masyarakat. Penanganan pengaduan dilakukan melalui koordinasi lintas bidang, kegiatan klarifikasi dan pengawasan lapangan, serta pemberian pembinaan maupun rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait.
28. Sasaran kinerja **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat** dengan indikator Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat memiliki target 1 Kelompok dan terealisasi 1 kelompok dengan persentase capaian 100% memenuhi kriteria sangat tinggi. Dengan terbentuknya masyarakat hukum adat, diharapkan keberadaan, hak tradisional, serta kearifan lokal masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi secara hukum, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan keberlanjutan sumber daya alam.
29. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup** Di Sekolah dengan indikator kinerja Persentase Sekolah Yang Terbina memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% persentase capaian tersebut diperoleh dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terbina pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Sekolah yang direncanakan mendapatkan pembinaan pada tahun (n)}} \times 100\%$ dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Melalui pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup disekolah, diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki akan kesadaran lingkungan sejak dini serta mampu menerapkan prinsip

pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan baik lingkungan sekolah maupun dalam bersosialisasi di masyarakat.

30. Sasaran kinerja **Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati** indikator Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan memiliki target 7.82Ha dan terealisasi 7.82Ha dengan persentase capaian 100% dan memenuhi kriteria sangat tinggi. pengelolaan lahan keanekaragaman hayati ini mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup daerah, peningkatan kualitas ekosistem, serta pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan sebagai ruang edukasi lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
31. Sasaran kinerja **Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau** dengan indikator Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau memiliki target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100% capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan $(\text{Ruang Terbuka Hijau Yang Dipelihara} / \text{Total Ruang Terbuka Hijau}) \times 100\%$ dan memenuhi kriteria sangat tinggi. Dengan terpeliharanya seluruh tutupan lahan pada ruang terbuka hijau, diharapkan kualitas lingkungan perkotaan semakin meningkat, risiko degradasi lingkungan dapat diminimalkan, serta keberadaan ruang hijau mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika secara berkelanjutan.
32. Sasaran kinerja **Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau** dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten memiliki target pada tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan $(\text{RTH Terbangun Sesuai Rencana dan Terpelihara} / \text{Ruang Terbuka Hijau yang Telah Direncanakan}) \times 100\%$ dengan memenuhi kriteria sangat tinggi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, seluruh ruang terbuka hijau yang direncanakan telah berhasil dibangun dan dipelihara dengan baik. Dengan terpenuhinya pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau secara menyeluruh, diharapkan kualitas lingkungan perkotaan semakin meningkat, daya dukung lingkungan tetap terjaga, serta tercipta lingkungan yang berkelanjutan dan ramah bagi masyarakat.

33. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar** diukur dengan indikator Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar. Adapun target indikator ini sebesar 26.87% dengan realisasi 29.80% atau capaian 110.90%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus $(\text{Jumlah Jalan Lingkungan Permukiman Optimal} / \text{Total Jalan Lingkungan Permukiman}) \times 100\%$ dengan perhitungan $(117+46)/547 \times 100\%$. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis, sehingga mendukung aksesibilitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat dalam lingkungan hunian. Keberhasilan melampaui target juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan sinergi antar kegiatan dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.
34. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar** diukur dengan indikator Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar. Adapun target indikator ini sebesar 22.30% dengan realisasi 21.94% atau capaian 98.39%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus $(\text{Jumlah Drainase Permukiman Optimal} / \text{Total Drainase Permukiman}) \times 100\%$ dengan perhitungan $(117+3)/547 \times 100\%$. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas sistem drainase lingkungan permukiman sesuai standar teknis, yang berperan penting dalam mengurangi genangan dan risiko banjir di kawasan hunian. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, hasil yang diperoleh menunjukkan kemajuan yang signifikan dan menjadi dasar untuk optimalisasi program pada periode berikutnya. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Titik

Drainase Permukiman Sesuai Standar maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.

35. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman** diukur dengan indikator Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru. Adapun target indikator ini sebesar 20 dokumen dengan realisasi 20 dokumen atau capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) permukiman telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan output kegiatan dalam bentuk dokumen pelaksanaan pekerjaan yang mencakup: Pemeliharaan rutin dan berkala titik PJU eksisting, serta Pemasangan titik PJU baru pada kawasan permukiman yang membutuhkan peningkatan penerangan. Secara umum, terpenuhinya target ini berkontribusi terhadap peningkatan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat di lingkungan permukiman, khususnya pada malam hari, serta mendukung mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi warga secara lebih optimal dan memperoleh kriteria sangat tinggi.
36. Sasaran kinerja **Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah** diukur dengan indikator Persentase PSU yang Diserahterimakan. Adapun target indikator ini sebesar 3.66% dengan realisasi 3.66% atau capaian 100%. Capaian sasaran tersebut didapat dengan rumus $(\text{Jumlah PSU Perumahan yang telah diserahterimakan} / \text{Jumlah PSU Perumahan keseluruhan}) \times 100\%$ dengan perhitungan $(20/547) \times 100\%$. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam penertiban administrasi dan kepastian pengelolaan PSU perumahan, sehingga aset yang telah dibangun pengembang dapat dikelola secara resmi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan, peningkatan kualitas layanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat penghuni perumahan. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase PSU yang Diserahterimakan maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.
37. Sasaran kinerja **Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah** diukur dengan indikator Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau

Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani. Adapun target dan realisasi indikator ini sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan hunian masyarakat terdampak bencana maupun relokasi program pemerintah. Penanganan yang tuntas ini tidak hanya memastikan tersedianya tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendukung pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.

38. Sasaran kinerja **Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan** diukur dengan indikator Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan. Adapun target dan realisasi sasaran ini sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan oleh pengembang. Kesesuaian pembangunan dengan siteplan sangat penting untuk menjamin keteraturan tata ruang, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta kepastian hukum bagi masyarakat penghuni. Dengan tercapainya target 100%, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan implementasi pembangunan perumahan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.
39. Sasaran kinerja **Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman** diukur dengan Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman. Adapun target dan realisasi kinerja sebesar 4 dokumen atau capaian 100%. Capaian ini mencerminkan kesiapan perencanaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman. Ketersediaan dokumen perencanaan yang lengkap dan terukur menjadi dasar penting dalam penentuan prioritas, penganggaran, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga upaya peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Capaian

tersebut diartikan semakin tingginya Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.

40. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar** diukur dengan indikator Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar. Adapun target indikator ini sebesar 26.87% dengan realisasi 29.80% atau capaian 110.90%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus $(\text{Jumlah Jalan Lingkungan Permukiman Optimal} / \text{Total Jalan Lingkungan Permukiman}) \times 100\%$ dengan perhitungan $(117+46)/547 \times 100\%$. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan permukiman yang memenuhi standar teknis, sehingga mendukung aksesibilitas, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat dalam lingkungan hunian. Keberhasilan melampaui target juga menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan sinergi antar kegiatan dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.
41. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar** diukur dengan indikator Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar. Adapun target indikator ini sebesar 22.30% dengan realisasi 21.94% atau capaian 98.39%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Capaian sasaran kinerja tersebut di dapat dengan rumus $(\text{Jumlah Drainase Permukiman Optimal} / \text{Total Drainase Permukiman}) \times 100\%$ dengan perhitungan $(117+3)/547 \times 100\%$. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas sistem drainase lingkungan permukiman sesuai standar teknis, yang berperan penting dalam mengurangi genangan dan risiko banjir di kawasan hunian. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, hasil yang diperoleh menunjukkan

kemajuan yang signifikan dan menjadi dasar untuk optimalisasi program pada periode berikutnya. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.

42. Sasaran kinerja **Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar** diukur dengan indikator Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar. Adapun target sasaran kinerja ini sebesar 0.89% dengan realisasi 0.47% atau capaian 52.81%. Capaian sasaran kinerja ini didapat dengan rumus $(\text{Jumlah RTLH yang ditangani} / \text{Jumlah RTLH Kab Banjar}) \times 100\%$ dengan perhitungan $((119)/40213) \times 100\%$. Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan oleh formulasi perhitungan yang menggunakan data gabungan lintas instansi. Pada perencanaan awal, target penanganan RTLH sebesar **356 unit**, yang di antaranya direncanakan berasal dari program **BSPS sebanyak 250 unit**. Namun, realisasi program BSPS hanya mencapai **31 unit**, sehingga jumlah total RTLH yang tertangani menjadi jauh lebih rendah dari rencana. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya persentase capaian indikator, karena perhitungan menggunakan total jumlah RTLH yang besar sebagai pembagi, sementara realisasi penanganan tidak sesuai dengan target awal yang telah diformulasikan. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan indikator sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kepastian dukungan program lintas instansi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian perencanaan, validasi target yang lebih realistis, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar capaian penanganan RTLH pada periode berikutnya dapat lebih optimal.
43. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar** diukur dengan Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak. Adapun target dan realisasi kinerja ini adalah sebesar 35% dengan capaian 100%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pembangunan rumah sesuai standar teknis dan persyaratan permukiman layak, baik dari aspek keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, maupun keteraturan tata ruang. Dengan tercapainya target 100%,

diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun atau merenovasi rumah sesuai standar dapat terus meningkat dan berdampak pada kualitas hunian yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Capaian tersebut diartikan semakin tingginya Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak maka semakin tinggi capaian kinerja. Hasil tersebut mendapat kriteria sangat tinggi.

44. Sasaran kinerja **Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah** diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh kriteria sangat tinggi. Dengan tersusunnya seluruh dokumen perangkat daerah secara baik dan sesuai ketentuan, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.
45. Sasaran **Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah** diukur dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara tertib mulai dari pencatatan transaksi, penatausahaan keuangan, rekonsiliasi data, hingga penyusunan laporan keuangan perangkat daerah secara tepat waktu. Selain itu, koordinasi yang baik antar pengelola keuangan turut mendukung tersusunnya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
46. Sasaran **Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah** dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah telah dilaksanakan secara tertib melalui kegiatan inventarisasi, pencatatan, pengamanan, serta pelaporan aset secara berkala. Selain itu, koordinasi antara

pengurus barang, pengelola aset, dan unit kerja terkait turut mendukung tersusunnya laporan aset yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tersusunnya laporan pengelolaan dan pengamanan aset sesuai ketentuan, diharapkan pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi lebih transparan, tertib administrasi, serta mampu mendukung efektivitas pemanfaatan aset dalam menunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah.

47. Sasaran **Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas**. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian telah berjalan secara optimal, meliputi pengelolaan data kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala, pengelolaan cuti, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pelayanan administrasi kepegawaian lainnya yang dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.
48. Sasaran **Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indikator **Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas**. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh tertibnya sistem pencatatan dan pengarsipan dokumen, optimalnya koordinasi antar unit kerja, serta konsistensi pelaksanaan administrasi sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen administrasi dapat disusun, didistribusikan, dan didokumentasikan secara tepat waktu dan akuntabel sehingga tidak ditemukan kendala administratif yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan.
49. Sasaran **Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah** dengan indikator **Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas**. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah telah disusun secara tepat waktu,

lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui proses sinkronisasi program dan kegiatan, verifikasi dokumen, serta pengendalian pelaporan kinerja sehingga dokumen yang dihasilkan dapat mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

50. Sasaran **Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah** dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan jasa penunjang pelayanan umum perangkat daerah telah dilaksanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Pelaksanaan jasa penunjang meliputi layanan operasional perkantoran, dukungan kebersihan, keamanan, utilitas, serta layanan pendukung lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan jasa penunjang yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan internal maupun eksternal perangkat daerah.
51. Sasaran **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah** dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas. Adapun target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari capaian tersebut sasaran ini memperoleh hasil sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat daerah telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kebutuhan dan standar operasional yang berlaku. Pemeliharaan dilakukan terhadap aset gedung, kendaraan operasional, peralatan kerja, serta fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	71.96	Indeks	74.92	104.11	64.15	127.28	58.8	117	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	71.21	Indeks	84.95	119.3	94.62	122.48	92.68	120	
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	70.73	Indeks	71.36	100.89	55.50	97.75	54.69	98	
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	53.98	%	54.12	100.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82.81	Nilai	76.82	92.77%	81.45	N/A	81.74	N/A	Belum menjadi indikator
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	22.58	%	27.25	79.31	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	46.43	%	49.29	106.15	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	0.40	%	0.4	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	17.09	Ha	17.09	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	54.60	%	54.74	100.26%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
13	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	76.95	%	76.86	99.88%	98.43	100.42%	97.69	100.47%	
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan	81	Nilai	89.25	110.19%	88.17	116.01%	75.51	102%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Permukiman dan Lingkungan Hidup									
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	38	Parameter	38	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	3	Parameter	3	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas	18	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	Laporan	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	Komunitas	18	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
19	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	50	%	78	155.96	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
20	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	50	%	35	69.6	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	32.75	%	33	100.8	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
22	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	54750	Ton	54020	98.67	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
23	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	46.43	%	49.29	106.16	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
24	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
25	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
26	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
27	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Ling	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(RPPLH) Kabupaten/Kota	ungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana									
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	1	Kelompok	1	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
29	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
30	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	7.82	Ha	7.82	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
31	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
32	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	100	%	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	%	29.8	110.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	%	21.94	98.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
35	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	20	Dokumen	20	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
36	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	3.66	%	3.66	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
38	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100%	100	100%	
39	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100	%	100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
40	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	4	Dokumen	4	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	%	29.8	110.90%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
42	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	%	21.94	98.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
43	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	0.89	%	1.18	132.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
44	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	35	%	35	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Belum menjadi indikator
45	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
46	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
47	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
					Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Daerah Perangkat Daerah										
48	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
49	Lancarnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
50	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
51	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	
52	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	%	100	100%	100	100%	100	100%	

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 202

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2024 dan 2023) berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, data menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada Tahun 2025 telah mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan, khususnya pada aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Beberapa indikator juga merupakan indikator baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel ini menggambarkan adanya tren peningkatan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan permukiman secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menjaga konsistensi serta peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi dengan target akhir Renstra

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	74.92	72.96	102.69
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84.95	72.21	117.64
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	71.36	71.08	100.39
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	%	54.12	69.20	78.21
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76.82	89.61	85.73
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	100	100	100
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	%	100	100	100
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	%	41.40	14.77	35.68
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	%	49.29	100	49.29
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	%	100	100	100
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	%	100	100	100
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	%	100	100	100
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	%	0.40	0.52	76.92
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Ha	17.09	22.00	0.78
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	%	54.74	69.83	78.39
13	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	76.86	77.96	98.59
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Nilai	89.25	85.00	105.00
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	Parameter	38	38	100
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	Parameter	3	3	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Komunitas	18	123	14.63
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	1	1	100
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Komunitas	18	123	14.63
19	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	%	77.98	73	107
20	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	%	34.8	100	34.8
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	%	33.16	100	33.2
22	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Ton	54750	36500	150
23	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	%	49.29	100	49.29
24	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	%	100	100	100
25	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	%	100	100	100
26	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
27	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	%	100	100	100
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1	1	100
29	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	%	100	100	100
30	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Ha	7.82	100	7.82
31	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	%	100	100	100
32	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang	%	100	100	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
		Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten				
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	%	29.8	59.05	50.47
34	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	%	21.94	32.36	67.80
35	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	Dokumen	20	36	55.56
36	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	%	3.66	21.94	16.68
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	%	100	100	100.00
38	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	%	100	100	100.00
39	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Dokumen	4	20	20.00
40	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	%	29.8	59.05	50.47
41	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	%	21.94	32.36	67.80
42	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	%	0.47	5.20	9.04
43	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	%	35	60.00	58.33
44	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100.00
45	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100.00
46	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	%	100	100	100.00
47	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	%	100	100	100.00
48	Lancarnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	%	100	100	100.00
49	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100.00
50	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	%	100	100	100.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
51	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	%	100	100	100.00

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025-2030

- Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Sasaran startegis Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan dengan 3(tiga) indikator Indeks Kualitas Ait dengan Target periode akhir tahun 2030 sebesar 72.96 dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 74.92 sehingga persentase capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2030 sebesar 102.69%, Indeks Kualitas Udara dengan target pada akhir periode tahun 2030 sebesar 72.21 dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 84.95 sehingga persentase capaian tahun 2025 terhadap target 2030 sebesar 117.64%, Indeks Kualitas Lahan target pada akhir periode tahun 2030 sebesar 71.08 dan terealisasi sebesar 71.36 sehingga persentase capaian tahun 2025 terhadap target 2030 sebesar 100.39%
- Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Permukiman dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni memiliki target periode akhir tahun 20230 sebesar 69.20% dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 54.12% sehingga persentase capaian tahun 2025 terhadap target 2030 sebesar 78.21%.
- Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai sikip perangkat daerah memiliki target pada periode akhir 2030 senilai 89.61 dan terealisasi pada tahun 2025 senilai 76.82 sehingga persentase capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2030 sebesar 85.73%

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional (jika ada)

Tabel 3.4

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	74.92	N/A	N/A
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84.95	N/A	N/A
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	71.36	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	%	54.12	N/A	N/A
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76.82	N/A	N/A
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	%	100	N/A	N/A
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	%	100	N/A	N/A
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	%	27.25	N/A	N/A
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	%	49.29	N/A	N/A
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	%	100	N/A	N/A
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	%	100	N/A	N/A
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	%	100	N/A	N/A
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	%	0.4	N/A	N/A
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Ha	17.09	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	%	54.74	N/A	N/A
13	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	76.86	N/A	N/A
14	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Nilai	89.25	N/A	N/A
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	Parameter	38	N/A	N/A
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	Parameter	3	N/A	N/A
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Komunitas	18	N/A	N/A
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Laporan	1	N/A	N/A
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Komunitas	18	N/A	N/A
19	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	%	77.98	N/A	N/A
20	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	%	34.8	N/A	N/A
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	%	33.16	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
22	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Ton	54750	N/A	N/A
23	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	%	49.29	N/A	N/A
24	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	%	100	N/A	N/A
25	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	%	100	N/A	N/A
26	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	100	N/A	N/A
27	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota Yang Terencana	%	100	N/A	N/A
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	Kelompok	1	N/A	N/A
29	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	%	100	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
30	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Ha	7.82	N/A	N/A
31	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	%	100	N/A	N/A
32	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	%	100	N/A	N/A
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	%	29.8	N/A	N/A
34	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	%	21.94	N/A	N/A
35	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	Dokumen	20	N/A	N/A
36	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	%	3.66	N/A	N/A
37	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	%	100	N/A	N/A
38	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	%	100	N/A	N/A
39	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Dokumen	4	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
40	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	%	29.8	N/A	N/A
41	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	%	21.94	N/A	N/A
42	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	%	0.47	N/A	N/A
43	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	%	35	N/A	N/A
44	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	%	100	N/A	N/A
45	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	100	N/A	N/A
46	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	%	100	N/A	N/A
47	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	%	100	N/A	N/A
48	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	%	100	N/A	N/A
49	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
50	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	%	100	N/A	N/A
51	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	%	100	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat gambaran umum mengenai capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2025 yang mencakup bidang lingkungan hidup, permukiman, serta tata kelola perangkat daerah. Data yang ditampilkan menunjukkan realisasi capaian kinerja terhadap masing-masing indikator, seperti kualitas air, udara dan lahan, kualitas permukiman layak huni, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, peningkatan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana prasarana permukiman, hingga pembinaan masyarakat dan kampung iklim.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Tabel ini juga berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur permukiman, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Adapun kolom realisasi provinsi dan nasional belum tersedia sehingga perbandingan kinerja antar tingkat pemerintahan belum dapat dilakukan pada periode pelaporan ini.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berikan narasi terkait faktor pendorong/penyebab keberhasilan untuk setiap indikator kinerja yang tercapai (target berhasil terealisasi). Dan berikan narasi faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk setiap indikator kinerja yang gagal direalisasi sesuai target. Dan sebutkan alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan diukur dengan 3 indikator yaitu :

- **Indeks Kualitas Air (IKA)** dengan target kinerja pada tahun 2025 sebanyak 71.96 indeks dan terealisasi sebanyak 74.92 indeks dengan persentase capaian 104.11%.

Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini adalah :

Terkendala untuk melakukan pengujian parameter air dikarenakan sesuai aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/

10/2020 tentang laboratorium Lingkungan dan peraturan terkait KAN K-01.01 bahwa pengambilan sample dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau Teregistrasi untuk pengujian Kualitas Air Sungai peruntukan Data IKA (Indeks Kualitas Air) dan pengujian Kualitas Udara peruntukan Data IKU (Indeks Kualitas Udara)–IKLH.

Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja ini

Faktor Pendorong pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan timeschedule yang telah ditetapkan serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kinerja.

- **Indeks Kualitas Udara (IKU)** dengan target kinerja pada tahun 2025 sebanyak 71.21 indeks dan terealisasi 84.95 indeks dengan persentase capaian 119.3%.

Adapun Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini dikarenakan terbatasnya laboratorium penguji udara dengan metode passive sampler sedangkan untuk pengukuran indeks kualitas udara hanya dapat dilakukan pengujian oleh beberapa laboratorium swasta yaitu yaitu Laboratorium Unilab Perdana Jakarta, PT.

Analisis Anugrah Sempurna Jakarta, Laboratorium ITEC bogor dan Laboratorium P3KLL KLHK serpong (Pemerintah). Untuk pengujian udara di haruskan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi sesuai dengan PermenLHK dan KAN 10-01, aturan pengambilan dan pengujian sampel, juga tarif pengujian yang sangat mahal.

Adapun faktor yang mendorong keberhasilan indikator ini adalah

Dengan melaksanakan pengendalian terhadap sumber pencemar udara, baik dari sektor transportasi, kegiatan konstruksi, maupun aktivitas pembakaran terbuka, berjalan cukup optimal sehingga kualitas udara ambien tetap terjaga, mengadakan Kegiatan pengendalian pencemaran udara seperti sosialisasi larangan pembakaran sampah, pengawasan kegiatan usaha, serta peningkatan ruang terbuka hijau memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas udara serta memonitoring kualitas udara tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal melalui kerja sama dengan laboratorium yang telah terakreditasi sehingga data IKU dapat diperoleh secara valid.

- **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** dengan target kinerja sebanyak 70.73 indeks dan terealisasi sebanyak 71.36 indeks dengan persentase capaian 100.89%.

Adapun Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini pada indikator ini adalah adanya pertumbuhan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi yang berpotensi dalam menyebabkan penurunan kualitas lahan apabila tidak diimbangi pengendalian pemanfaatan ruang, aktivitas pembukaan lahan, erosi serta pengelolaan lahan yang kurang ramah lingkungan masih menjadi risiko terhadap penurunan kualitas tanah serta keterbatasan tenaga teknis dan peralatan monitoring lingkungan menyebabkan pengawasan kondisi lahan yang belum optimal

Adapun faktor yang mendorong keberhasilan indikator ini adalah dengan melakukan upaya rehabilitasi lahan, penghijauan, serta pengendalian kerusakan lingkungan mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lahan. Adapula sinergi antara perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program lingkungan hidup dan

penataan ruang dan partisipasi masyarakat akan meningkatnya kesadaran dalam menjaga lingkungan.

2. Capaian kinerja meningkatnya Kualitas Permukiman dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni memiliki target 53.98% dengan realisasi 54.12% atau capaian 100.26%. faktor penghambat keberhasilan kinerja ini adalah masih adanya beberapa wilayah permukiman masih memerlukan peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan akses jalan lingkungan.

Adapun Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini antara lain masih adanya wilayah permukiman yang belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai seperti sistem drainase lingkungan, sarana sanitasi yang layak, serta kondisi jalan lingkungan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Adapun faktor yang mendorong keberhasilan indikator ini adalah adanya ketersediaan data dukung dari kolaborasi stakeholder/instansi terkait dan tersedianya anggaran; Koordinasi yang baik mulai dari perencana, pengawas dan pelaksana sehingga pekerjaan dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan perencanaan pembangunan berbasis skala prioritas pada kawasan yang masih tergolong kurang layak huni, penguatan sinergi program antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur permukiman, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan guna menjaga keberlanjutan kualitas permukiman sehingga capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih merata dan berkelanjutan.

3. Capaian kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah memiliki target pada tahun 2025 senilai 82.81 dan terealisasi senilai 76.82 dengan persentase capaian 92.77%.

Faktor penghambat yang menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja ini dalam perlu melakukan Penyelarasan antara dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan penguatan, Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya, Pemahaman aparatur terhadap implementasi SAKIP secara menyeluruh masih perlu ditingkatkan.

Faktor yang dapat mendorong tercapainya kinerja ini adalah adanya Dukungan koordinasi antar bidang dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah adapun **upaya perbaikan yang dilakukan** dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun berikutnya adalah dengan Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan implementasi SAKIP dan manajemen kinerja.

4. Capaian kinerja Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- **Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu** dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target kinerja pada tahun 2025 sebanyak 71.96 indeks dan terealisasi sebanyak 74.92 indeks dengan persentase capaian 104.11%.

Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini terkendala untuk melakukan pengujian parameter air dikarenakan sesuai aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/

10/2020 tentang laboratorium Lingkungan dan peraturan terkait KAN K-01.01 bahwa pengambilan sample dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau Teregistrasi untuk pengujian Kualitas Air Sungai peruntukan Data IKA (Indeks Kualitas Air) dan pengujian Kualitas Udara peruntukan Data IKU (Indeks Kualitas Udara)–IKLH.

Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan timeschedule yang telah ditetapkan serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kinerja.

- **Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu** dengan target 100% pada setiap indikator dan telah terealisasi 100% pada setiap indikator dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini karena terbatasnya laboratorium pengujian udara dengan metode passive sampler sedangkan untuk pengukuran indeks kualitas udara hanya dapat dilakukan pengujian oleh beberapa laboratorium swasta yaitu yaitu Laboratorium Unilab Perdana Jakarta, PT. Analisis Anugrah Sempurna Jakarta, Laboratorium ITEC bogor dan Laboratorium P3KLL KLHK serpong (Pemerintah). Untuk pengujian udara di haruskan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi sesuai dengan PermenLHK dan KAN 10-01, aturan pengambilan dan pengujian sampel, juga tarif pengujian yang sangat mahal.

Faktor yang mendorong keberhasilan indikator ini dengan melaksanakan pengendalian terhadap sumber pencemar udara, baik dari sektor transportasi, kegiatan konstruksi, maupun aktivitas pembakaran terbuka, berjalan cukup optimal sehingga kualitas udara ambien tetap terjaga, mengadakan Kegiatan pengendalian pencemaran udara seperti sosialisasi larangan pembakaran sampah, pengawasan kegiatan usaha, serta peningkatan ruang terbuka hijau memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas udara serta memonitoring kualitas udara tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal melalui kerja sama dengan laboratorium yang telah terakreditasi sehingga data IKU dapat diperoleh secara valid.

5. Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA diukur dengan indikator persentase sampah dibuang ke TPA dengan target pada tahun 2025 sebesar 22.58% dan terealisasi sebesar 27.25% dengan persentase capaian 79.31% sasaran ini merupakan perhitungan negatif dimana semakin kecil angka realisasi maka semakin baik.

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran ini adalah Kurangnya pembentukan lembaga pengelolaan sampah(kelompok swadaya masyarakat dan TPS3R) - anggaran tipping fee tidak mencukupi untuk target 70 ton perhari.

Faktor yang mendorong keberhasilan pada indikator ini adalah - optimalnya proses pengelolaan sampah diklemabgaan atau fasilitas (KSM, TPS3R Dan bank sampah) dalam pengelolaan sampah

upaya perbaikan agar indikator ini dapat tercapai adalah dengan melaksanakan penguatan Penguatan regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah di hulu.

6. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan limbah B3 diukur dengan indikator persentase pelaku usaha yang mengelola limbah B3 dengan baik. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 46.43% dan terealisasi sebesar 49.29% dengan persentase capaian 106.15%.

Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pada kinerja ini masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha skala kecil masih belum memahami secara optimal tentang tata cara pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan serta terbatasnya fasilitas pengumpulan dan pengelolaan limbah B3 berizin menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses pengelolaan.

Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya kinerja ini dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan mengadakan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis, serta pengawasan terhadap pelaku usaha mendorong meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan limbah B3 serta pemenuhan dokumen lingkungan dan perizinan berusaha berbasis risiko turut meningkatkan kepatuhan pengelolaan limbah B3.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar indikator ini dapat tercapai meliputi peningkatan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada pelaku usaha, penguatan pengawasan lapangan secara berkala, serta pendampingan dalam pemenuhan dokumen lingkungan dan sistem pelaporan pengelolaan limbah B3. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan penyedia jasa pengelolaan limbah B3 berizin terus dilakukan guna memastikan pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

7. Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan diukur dengan indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap

Pengelolaan Lingkungan. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya pada kinerja ini adanya dinamika pertumbuhan usaha baru serta munculnya pelaku usaha baru memerlukan pengawasan dan pembinaan tambahan agar tingkat ketaatan tetap terjaga serta Tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan teknis yang sama dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan lingkungan.

pada sasaran ini adalah dengan meningkatkan ketaatan pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan dengan melakukan pengawasan ke pelaku usaha/perusahaan yang ada di kabupaten banjar.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan agar kinerja ini dapat berjalan dengan baik adalah dengan melakukan peningkatan frekuensi pembinaan dan pengawasan lingkungan secara berkala, Melaksanakan sosialisasi regulasi lingkungan hidup kepada pelaku usaha baru, dan Meningkatkan kapasitas SDM pengawas lingkungan melalui pelatihan teknis.

8. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia. Adapun target kinerja pada sasaran ini adalah persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor penghambat pada kinerja ini adalah Keterbatasan Data Updating Secara Berkala karena diperlukan Pembaruan data lingkungan hidup terkadang membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor dan adanya Beban kerja penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan evaluasi cukup tinggi dibandingkan jumlah personel yang tersedia

Faktor pendorong keberhasilan pada kinerja ini adalah terlaksananya rapat antara dinas terkait dengan pelaku usaha sehingga mempermudah komunikasi, koordinasi yang baik antar OPD dengan pelaku usahaperusahaan terkait dalam penyediaan data dan informasi pendukung.

Upaya yang dilakukan agar dapat memperbaiki pelaksanaan kinerja ini adalah dengan Meningkatkan integrasi data lingkungan hidup melalui sistem informasi berbasis digital,

Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui pelatihan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, Melakukan evaluasi dokumen secara periodik guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

9. Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan diukur dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan. Target pada sasaran ini adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja ini adalah jika keterlibatan masyarakat di beberapa wilayah belum merata, dan sebagian kegiatan masyarakat masih bergantung pada dukungan program pemerintah serta Ketersediaan fasilitas pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat belum sepenuhnya merata.

Faktor yang mendorong keberhasilan pada sasaran ini adalah adanya regulasi dan kebijakan daerah yang mengakui serta mendukung peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah dengan partisipasi masyarakat kedepan adalah dengan Meningkatkan edukasi dan kampanye lingkungan hidup secara berkelanjutan, Memberikan dukungan sarana dan prasarana kegiatan lingkungan berbasis masyarakat, serta Mengembangkan program inovasi lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

10. Sasaran kinerja Meningkatnya Tutupan Lahan diukur dengan indikator Persentase Tutupan Lahan. Target kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0.40% dan terealisasi sebesar 0.40% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini adanya alih fungsi lahan dalam Perkembangan pembangunan dan kebutuhan lahan permukiman berpotensi mengurangi area tutupan vegetasi, Ketersediaan lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan tutupan lahan semakin terbatas.

Adapun faktor pendorong keberhasilan sasaran ini dengan adanya kegiatan penghijauan, dan penanaman vegetasi telah dilaksanakan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan serta adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman

dan pemeliharaan vegetasi turut serta dalam mendukung tercapainya target pada sasaran ini.

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan ke depan, upaya yang dapat dilakukan dengan cara Meningkatkan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan secara berkelanjutan, Melaksanakan pemeliharaan tanaman secara berkala untuk meningkatkan tingkat keberhasilan tumbuh, Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan penanaman pohon.

11. Sasaran kinerja meningkatnya tutupan lahan di ruang terbuka hijau diukur dengan indikator luas tutupan lahan diruang terbuka hijau. Target kinerja pada sasaran ini seluas 17.09 Ha dan terealisasi seluas 17.09 Ha dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini adalah Tekanan pembangunan berpotensi mengurangi luas ruang terbuka hijau apabila tidak dikendalikan secara optimal.

Adapun faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini adalah adanya perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau yang terarah dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan kegiatan penanaman serta pemeliharaan vegetasi yang berjalan dengan baik, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, koordinasi yang efektif antar perangkat daerah serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan turut berkontribusi terhadap tercapainya luasan tutupan lahan sesuai target yang telah ditetapkan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan ruang terbuka hijau ke depan, upaya yang dilakukan Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan RTH melalui program penghijauan lingkungan.

12. Capaian Sasaran kinerja Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman diukur dengan indikator berupa Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal memiliki target sebesar 54.60% dengan realisasi 54.74% atau capaian 100.26%. Sasaran Kinerja ini diampu oleh 3 Program yaitu Program Kawasan Permukiman, Program

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU.

Faktor yang menjadi penghambat pada kinerja ini antara lain belum meratanya ketersediaan PSU pada seluruh kawasan permukiman, keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang terus meningkat, serta adanya kendala teknis di lapangan seperti kesiapan lahan, kondisi geografis wilayah, dan pertumbuhan kawasan permukiman baru yang cukup cepat. Selain itu, pemeliharaan PSU yang belum optimal di beberapa lokasi juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kualitas layanan permukiman.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran kinerja ini adalah adanya Anggaran untuk pelaksanaan paket pekerjaan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, adanya Kerjasama tim lapangan yang baik dan Koordinasi yang baik mulai dari perencana, pengawas dan pelaksana sehingga pekerjaan dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penyusunan perencanaan pembangunan PSU berbasis prioritas kawasan yang masih kekurangan layanan dasar, peningkatan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman. Selain itu, dilakukan peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan PSU guna memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

13. Capaian sasaran kinerja meningkatnya rumah layak huni diukur dengan indikator persentase rumah layak huni memiliki target 76.95% dengan realisasi 76.86% atau capaian 99.88%. Capaian sasaran ini berasal dari gabungan penanganan rumah tidak layak huni dari DPRKPLH, Provinsi dan BSPS.

Faktor penghambat keberhasilan sasaran kinerja ini adalah data yang digunakan berasal dari data gabungan berbagai instansi. Untuk penanganan RTLH di DPRKPLH sebanyak 119 unit, 39 unit Provinsi dan 31 unit dari BSPS. Target pada tahun 2025 sebanyak 356 unit RTLH yang ditangani namun hanya 189 Unit yang dapat terlaksana.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adanya koordinasi dan kolaborasi pendanaan antar tingkat pemerintahan, komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat, serta partisipasi masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan secara swadaya.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan akurasi dan pemutakhiran data rumah tidak layak huni secara berkala, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna meningkatkan alokasi program bantuan perumahan, serta percepatan proses perencanaan dan verifikasi calon penerima bantuan. Selain itu, dilakukan peningkatan pendampingan teknis kepada masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar kelayakan hunian sehingga capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

14. Capaian sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah diukur dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, adapun target pada sasaran ini senilai 81 dan terealisasi senilai 89.25 dengan persentase capaian 110.19%.

Faktor yang bisa menjadi penghambat dalam tercapainya kinerja ini adalah Banyaknya dokumen perencanaan dan pelaporan membutuhkan ketelitian serta pengelolaan waktu yang optimal.

Faktor yang mendorong keberhasilannya sasaran ini adalah terkumpulnya data dukung yang sesuai dengan permintaan pada LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang diberikan oleh Inspektorat.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mencapai target pada kinerja ini adalah dengan Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan kinerja dan administrasi pemerintahan, Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan, Memperkuat koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

15. Sasaran kinerja Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- **parameter air yang dipantau** dengan target 38 parameter terealisasi senilai 38 parameter dengan persentase capaian 100%

Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini terkendala untuk melakukan pengujian parameter air dikarenakan sesuai aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2020 tentang laboratorium Lingkungan dan peraturan terkait KAN K-01.01 bahwa pengambilan sample dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau Teregristerasi untuk pengujian Kualitas Air Sungai peruntukan Data IKA (Indeks Kualitas Air) dan pengujian Kualitas Udara peruntukan Data IKU (Indeks Kualitas Udara)–IKLH.

Faktor pendorong Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan timeschedule yang telah ditetapkan serta adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kinerja.

- **parameter ambien udara yang dipantau** dengan target 3 parameter terealisasi 3 parameter dengan capaian 100%.

Faktor yang menghambat tercapainya indikator ini karena terbatasnya laboratorium penguji udara dengan metode passive sampler sedangkan untuk pengukuran indeks kualitas udara hanya dapat dilakukan pengujian oleh beberapa laboratorium swasta yaitu yaitu Laboratorium Unilab Perdana Jakarta, PT. Analisis Anugrah Sempurna Jakarta, Laboratorium ITEC bogor dan Laboratorium P3KLL KLHK serpong (Pemerintah). Untuk pengujian udara di haruskan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi sesuai dengan PermenLHK dan KAN 10-01, aturan pengambilan dan pengujian sampel, juga tarif pengujian yang sangat mahal.

Faktor yang mendorong keberhasilan indikator ini dengan melaksanakan pengendalian terhadap sumber pencemar udara, baik dari sektor transportasi, kegiatan konstruksi, maupun aktivitas pembakaran terbuka, berjalan cukup optimal sehingga kualitas udara ambien tetap terjaga, mengadakan Kegiatan pengendalian pencemaran udara seperti sosialisasi larangan pembakaran sampah, pengawasan kegiatan usaha, serta peningkatan

ruang terbuka hijau memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas udara serta memonitoring kualitas udara tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal melalui kerja sama dengan laboratorium yang telah terakreditasi sehingga data IKU dapat diperoleh secara valid.

16. Sasaran kinerja meningkatnya pembinaan komunitas kampung iklim diukur dengan indikator jumlah komunitas kampung iklim yang dibina, target kinerja pada sasaran ini sebanyak 18 komunitas dan terealisasi 18 komunitas dengan persentase capaian 100%.

Faktor penghambat yang dapat menjadi kegagalan dalam tercapainya kinerja ini adalah Keterbatasan sumber daya manusia pendamping di lapangan dibandingkan dengan jumlah lokasi binaan, Tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata terkait pengelolaan Program Kampung Iklim secara berkelanjutan.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan tercapainya sasaran ini didukung oleh perencanaan program pembinaan yang terstruktur dan tepat sasaran, komitmen serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan, serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, partisipasi aktif komunitas Kampung Iklim serta pelaksanaan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan turut berkontribusi signifikan terhadap tercapainya target pembinaan komunitas.

upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja ke depan adalah dengan Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada komunitas kampung iklim secara berkala, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menjaga keberlanjutan program kampung iklim.

17. Sasaran kinerja terlaksananya penyusunan laporan inventarisasi gas rumah kaca diukur dengan indikator jumlah laporan inventarisasi gas rumah kaca, target kinerja pada sasaran ini sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menghambat tercapainya realisasi kinerja ini adalah Masih terbatasnya pemahaman teknis sebagian pihak terkait metode perhitungan emisi Gas

Rumah Kaca serta Ketergantungan terhadap data sekunder dari instansi lain yang mempengaruhi ketepatan waktu pengolahan data.

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini didukung oleh ketersediaan regulasi dan pedoman teknis inventarisasi gas rumah kaca sebagai acuan pelaksanaan, perencanaan kegiatan yang sistematis dan terjadwal, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penyediaan data, serta tersedianya data dan informasi pendukung yang lengkap, turut mendukung kelancaran proses penyusunan laporan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan,

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan dengan Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis terkait inventarisasi Gas Rumah Kaca, Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi lingkungan hidup dalam pengelolaan data emisi serta Mendorong penyediaan data yang lebih akurat dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas laporan inventarisasi GRK pada tahun berikutnya.

18. Sasaran kinerja meningkatnya pembinaan komunitas kampung iklim diukur dengan indikator jumlah komunitas kampung iklim yang dibina, target kinerja pada sasaran ini sebanyak 18 komunitas dan terealisasi 18 komunitas dengan persentase capaian 100%.

Faktor penghambat yang dapat menjadi kegagalan dalam tercapainya kinerja ini adalah Keterbatasan sumber daya manusia pendamping di lapangan dibandingkan dengan jumlah lokasi binaan, Tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata terkait pengelolaan Program Kampung Iklim secara berkelanjutan.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan tercapaiannya sasaran ini didukung oleh perencanaan program pembinaan yang terstruktur dan tepat sasaran, komitmen serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan, serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, partisipasi aktif komunitas Kampung Iklim serta pelaksanaan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan turut berkontribusi signifikan terhadap tercapainya target pembinaan komunitas.

upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja ke depan adalah dengan Meningkatkan intensitas pembinaan dan pendampingan kepada komunitas kampung iklim secara berkala, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna menjaga keberlanjutan program kampung iklim.

19. Sasaran kinerja Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah diukur dengan indikator Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif. Target kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 50% dan terealisasi sebesar 77.98% dengan persentase capaian 155.96%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya realisasi kinerja ini adalah Belum meratanya kapasitas kelembagaan pengelola sampah di seluruh wilayah, Keterbatasan sumber daya manusia pengelola dalam aspek manajemen operasional dan administrasi dan Keterbatasan dukungan pembiayaan operasional bagi beberapa lembaga pengelola sampah.

Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran ini antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah melalui bank sampah dan kelompok swadya masyarakat (KSM) dengan tema ayo menabung ke Bank Sampah di beberapa desa yang sudah terbentuk bank sampah seperti kelurahan keraton, kelurahan murung keraton, desa sungai rangas tengah, juga ada pembentukan KSM dan bank sampah yang belum terbentuk di desa pekauman, desa kayu bawang, kelurahan gambut barat dan

upaya perbaikan yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dengan Meningkatkan pembinaan teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola sampah secara berkelanjutan, Mendorong kemandirian lembaga melalui pengembangan ekonomi sirkular dan pemanfaatan nilai ekonomis sampah dan Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan aktivitas lembaga pengelola sampah.

20. Sasaran kinerja meningkatnya kesadaran rumah tangga dalam pengelolaan sampah diukur dengan indikator persentase rumah tangga sebagai nasabah lembaga pengelolaan sampah. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 50% dan terealisasi 34.8% dengan persentase capaian 69.6%.

Faktor yang dapat menghambat tercapainya kinerja ini kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah dari sumber masih belum merata, Sebagian masyarakat belum memahami manfaat ekonomi maupun lingkungan dari keikutsertaan sebagai nasabah bank sampah.

Faktor pendorong keberhasilan dari sasaran ini antara lain dengan Adanya kebijakan dan program pemerintah daerah, meningkatnya kepedulian lingkungan masyarakat, peran aktif bank sampah dan komunitas, serta dukungan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah dari berbagai pihak

upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja memperluas cakupan layanan bank sampah dan lembaga pengelolaan sampah hingga tingkat lingkungan/RT dan melakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan partisipasi masyarakat.

21. Sasaran kinerja optimalnya pengurangan sampah diukur dengan persentase sampah yang dikurangi. Target kinerja pada indikator ini sebesar 32.75% dan terealisasi sebesar 33.16% dengan persentase capaian 101.25%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini kurangnya Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber belum merata di seluruh wilayah dan Fluktuasi volume timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat serta Belum optimalnya partisipasi pelaku usaha dalam upaya pengurangan sampah.

Faktor pendorong keberhasilan pada sasaran ini antara lain pelaksanaan kebijakan dan program pengurangan sampah yang konsisten, meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah dari sumber, penguatan peran bank sampah dan TPS3R, dukungan sarana dan prasarana pengurangan sampah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R). Selain itu, koordinasi lintas sektor dan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan turut berkontribusi terhadap tercapainya target pengurangan sampah sesuai dengan yang direncanakan

upaya perbaikan yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya dengan meningkatkan edukasi perubahan perilaku

masyarakat menuju pengelolaan sampah berbasis sumber, Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh pelaku usaha dan kawasan komersial dan meningkatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam implementasi ekonomi sirkular.

22. Sasaran kinerja Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah diukur dengan indikator Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah. Target kinerja pada sasaran ini sebanyak 54750 ton dan terealisasi sebesar 54020 ton dengan persentase capaian 98.67%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan sampah seperti armada pengangkut yang mengalami kerusakan atau keterbatasan jumlah operasional sehingga mempengaruhi volume sampah yang dapat diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber di daerah hulu sehingga sebagian sampah tidak dapat segera diolah secara efektif pada tahap pemrosesan akhir.

Faktor pendorong keberhasilan tercapainya sasaran ini antara lain perencanaan operasional pengelolaan sampah yang terstruktur, berfungsinya fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA) secara optimal, serta tersedianya sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, pelaksanaan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang rutin, ketersediaan sumber daya manusia pengelola yang kompeten, serta dukungan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, dan mitra pengelola turut mendukung tertanganinya sampah melalui pemrosesan akhir sesuai dengan target yang ditetapkan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan capaian pada kinerja ini adalah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana persampahan terutama armada pengangkutan dan peralatan operasional di TPA dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

23. Sasaran kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 46.43% dan terealisasi sebesar 49.29% dengan persentase capaian 106.16%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya indikator ini rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan, khususnya terkait Rincian Teknis dan Persetujuan Teknis sebagai persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko, adanya Perubahan dan penyesuaian regulasi perizinan lingkungan yang menyebabkan pelaku usaha membutuhkan waktu adaptasi terhadap mekanisme baru dalam sistem perizinan berusaha.

Faktor pendorong yang mendukung sasaran ini antara lain tersedianya regulasi dan pedoman teknis perizinan lingkungan yang jelas, meningkatnya intensitas sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pemenuhan dokumen teknis, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan. Selain itu, perbaikan sistem pelayanan perizinan, pemanfaatan layanan perizinan berbasis elektronik, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan perangkat daerah terkait turut mendukung percepatan penerbitan rincian teknis dan/atau persetujuan teknis.

Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan guna meningkatkan capaian kinerja ini adalah dengan melakukan Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pemenuhan Rincian Teknis dan Persetujuan Teknis melalui kegiatan bimbingan teknis, konsultasi teknis, dan penyebarluasan informasi regulasi dan Peningkatan kapasitas aparatur pengelola perizinan lingkungan melalui pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi guna mendukung kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.

24. Sasaran kinerja Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan diukur dengan indikator Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja ini adanya keterbatasan pemahaman pemrakarsa kegiatan terhadap ketentuan teknis penyusunan dokumen lingkungan, khususnya terkait standar baku mutu, pengelolaan dampak lingkungan, serta persyaratan administrasi.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersedianya regulasi dan pedoman teknis penyusunan dokumen persetujuan lingkungan yang jelas dan mutakhir, kompetensi sumber daya manusia penyusun dan penilai dokumen yang memadai, serta pelaksanaan proses verifikasi dan evaluasi dokumen yang konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait, serta komitmen pimpinan dan seluruh pelaksana dalam menjaga kualitas dokumen turut mendukung tercapainya kesesuaian dokumen persetujuan lingkungan secara optimal.

upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna menunjang keberhasilan capaian kinerja ini adalah mengoptimalkan penggunaan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik, guna mempercepat proses administrasi, evaluasi dokumen, serta meningkatkan transparansi pelayanan.

25. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha diukur dengan indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini dikarenakan proses tindak lanjut penegakan hukum yang memerlukan koordinasi lintas instansi sehingga penyelesaian pelanggaran lingkungan membutuhkan waktu lebih panjang dan sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersusunnya rencana dan jadwal pengawasan yang sistematis, tersedianya regulasi dan pedoman pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang jelas, serta meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparaturnya pengawasan lingkungan hidup. Selain

itu, terjalinnya koordinasi yang baik dengan instansi penegak hukum dan perangkat daerah terkait, dukungan sarana dan prasarana operasional, serta komitmen pimpinan dan pelaksana dalam melaksanakan pengawasan secara konsisten turut mendukung terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan target yang ditetapkan.

upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam Peningkatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar pemenuhan kewajiban lingkungan dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

26. Sasaran kinerja Meningkatnya Penanganan Pengaduan diukur dengan indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini karena terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyampaian pengaduan lingkungan.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersedianya mekanisme dan standar operasional prosedur penanganan pengaduan yang jelas, terselenggaranya sistem penerimaan dan pencatatan pengaduan yang terintegrasi, serta responsivitas aparatur dalam menindaklanjuti setiap pengaduan secara tepat waktu. Selain itu, meningkatnya koordinasi antar bidang dan dengan instansi terkait, dukungan sarana dan prasarana pengaduan, serta komitmen pimpinan dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel turut mendukung terlaksananya penanganan pengaduan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dengan mengadakan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara penyampaian pengaduan baik melalui media informasi, layanan pengaduan resmi, maupun kanal digital.

27. Sasaran kinerja tersedianya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/Kota diukur dengan persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota yang terencana. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini dikarenakan adanya Perubahan dinamika kebijakan dan regulasi lingkungan hidup, yang memerlukan penyesuaian substansi dokumen selama proses penyusunan berlangsung.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain regulasi dan pedoman penyusunan RPPLH yang jelas, dukungan penuh pimpinan daerah terhadap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kompetensi sumber daya manusia penyusun dokumen yang memadai. Selain itu, terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah, ketersediaan data dan informasi lingkungan yang cukup, serta pelaksanaan tahapan perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan turut mendukung tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai standar.

Upaya perbaikan yang harus dilakukan dengan mengadakan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi RPPLH agar dokumen yang telah disusun dapat digunakan secara efektif sebagai dasar pengambilan kebijakan lingkungan.

28. Sasaran kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembentukan masyarakat hukum adat diukur dengan indikator Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat. Target kinerja pada sasaran ini sebanyak 1 kelompok dan terealisasi 1 kelompok dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini karena Proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat yang cukup panjang, karena harus melalui tahapan pengkajian sejarah, wilayah adat, kelembagaan adat, serta sistem hukum adat yang berlaku.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain adanya dukungan kebijakan dan regulasi terkait pengakuan masyarakat hukum adat, meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan lembaga adat dalam proses pembentukan, serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan kegiatan. Selain itu, tersedianya pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait, dukungan data dan informasi sosial budaya, serta komitmen pimpinan daerah dalam

mendorong pengakuan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat turut mendukung terbentuknya masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mendukung pembentukan masyarakat hukum adat dengan melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat serta manfaat perlindungan hukum yang diperoleh.

29. Sasaran kinerja Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah diukur dengan indikator Persentase Sekolah Yang Terbina. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja pada kinerja ini Perbedaan tingkat komitmen dan kesiapan masing-masing sekolah terutama dalam mengintegrasikan program peduli lingkungan ke dalam kegiatan rutin sekolah.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersusunnya program pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup secara terencana, dukungan kebijakan dan koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan serta pihak sekolah, serta tersedianya tenaga pembina dan narasumber yang kompeten. Selain itu, tingginya komitmen pihak sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan, partisipasi aktif warga sekolah, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan turut mendukung tercapainya target pembinaan sekolah sesuai dengan yang direncanakan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada sekolah agar program peduli dan berbudaya lingkungan hidup dapat diterapkan secara konsisten.

30. Sasaran kinerja Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati diukur dengan indikator Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola. Target kinerja pada sasaran ini seluas 7.82 Ha dan terealisasi 7.82 Ha dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini adalah adanya Ancaman alih fungsi lahan dan tekanan aktivitas masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas

kawasan keanekaragaman hayati apabila pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersedianya perencanaan dan penetapan lokasi pengelolaan lahan keanekaragaman hayati yang jelas, dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta ketersediaan sumber daya manusia pengelola yang kompeten. Selain itu, terjalinnya kerja sama dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan terkait, dukungan sarana dan prasarana pengelolaan lahan, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan monitoring secara berkelanjutan turut mendukung tercapainya pengelolaan lahan keanekaragaman hayati sesuai dengan target yang ditetapkan

upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan Penguatan peran serta masyarakat dan kelompok peduli lingkungan, melalui kegiatan pemberdayaan dan edukasi konservasi lingkungan serta Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam mendukung perlindungan kawasan dari potensi kerusakan atau alih fungsi lahan.

31. Sasaran kinerja Meningkatkan Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau diukur dengan indikator Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini adanya Kerusakan vegetasi akibat faktor alam maupun aktivitas manusia, seperti cuaca ekstrem, vandalisme, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas RTH dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengelolaan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan.

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersedianya perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang terstruktur, dukungan kebijakan daerah dalam penyediaan dan perlindungan ruang terbuka hijau, serta pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi secara berkelanjutan. Selain itu, terjalinnya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait, dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta ketersediaan sarana prasarana pemeliharaan turut mendukung

terjaganya tutupan lahan ruang terbuka hijau sesuai dengan target yang ditetapkan dan **upaya perbaikan yang dapat dilakukan** adalah dengan melakukan penguatan perencanaan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan melalui integrasi kebijakan RTH dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mendorong partisipasi masyarakat, komunitas, dan dunia usaha melalui program penghijauan dan tanggung jawab sosial lingkungan.

32. Sasaran kinerja Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau diukur dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini adalah dikarenakan keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan RTH, terutama pada kawasan yang mengalami perkembangan pertumbuhan yang cukup pesat

Faktor pendorong yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain tersusunnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang terintegrasi, dukungan kebijakan daerah dalam penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, serta tersedianya alokasi anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, terjalannya koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan secara rutin turut mendukung tercapainya target pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sesuai dengan yang direncanakan.

upaya perbaikan yang dapat dilakukan pada kinerja ini dengan mengoptimalkan keterbatasan lahan yang ada agar fungsi ekologis dan estetika kawasan tetap dapat berjalan dengan baik.

33. sasaran kinerja meningkatnya rumah layak huni diukur dengan indikator persentase rumah layak huni memiliki target 76.95% dengan realisasi 76.86% atau capaian 99.88%. Capaian sasaran ini berasal dari gabungan penanganan rumah tidak layak huni dari DPRKPLH, Provinsi dan BSPS.

Faktor penghambat keberhasilan sasaran kinerja ini adalah data yang digunakan berasal dari data gabungan berbagai instansi. Untuk penanganan RTLH di DPRKPLH sebanyak

119 unit, 39 unit Provinsi dan 31 unit dari BSPS. Target pada tahun 2025 sebanyak 356 unit RTLH yang ditangani namun hanya 189 Unit yang dapat terlaksana

Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan capaian kinerja ini didukung dengan adanya sinergi pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya, serta koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kegiatan perumahan.

Upaya perbaikan yang dilakukan meliputi peningkatan akurasi data rumah tidak layak huni melalui pemutakhiran basis data secara berkala, penguatan koordinasi lintas pemerintah dan pemangku kepentingan guna memperluas sumber pembiayaan, percepatan proses administrasi pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat agar pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target kinerja secara optimal pada periode berikutnya.

34. sasaran kinerja meningkatnya kualitas jalan lingkungan permukiman sesuai standar diukur dengan persentase titik jalan lingkungan permukiman sesuai standar memiliki target sebesar 26.87% dengan realisasi 29.80% atau capaian 110.90%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini antara lain keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan jalan lingkungan yang cukup luas, kondisi eksisting jalan yang bervariasi sehingga membutuhkan penanganan teknis berbeda, keterbatasan kesiapan lahan pada beberapa lokasi akibat permasalahan status kepemilikan, serta adanya faktor cuaca yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya Penambahan Anggaran pada DPA Perubahan dan dukungan dari berbagai stakeholder yang terkait.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan perencanaan prioritas lokasi berbasis tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat dalam penyelesaian kesiapan lahan, optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui penjadwalan pekerjaan yang lebih efektif, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar teknis.

35. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas drainase permukiman sesuai standar diukur dengan persentase titik drainase permukiman sesuai standar memiliki target sebesar 22.30% dengan realisasi 21.94% atau capaian 98.39%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja ini dikarenakan paket pekerjaan drainase pada bidang permukiman tidak dapat terhitung karena Lokasi kegiatan diluar SK kumuh terbaru.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adanya dukungan program peningkatan infrastruktur permukiman yang terencana dengan baik, koordinasi yang cukup efektif antara perangkat daerah pelaksana dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta komitmen pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase. Adapun

upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian target kinerja antara lain melalui peningkatan ketepatan perencanaan teknis dan penentuan prioritas lokasi penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi genangan, penguatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang ditetapkan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia.

36. Sasaran kinerja Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman diukur dengan Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru memiliki target 20 dan realisasi 20 dokumen atau capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan sasaran ini adalah keterbatasan jaringan listrik pada beberapa lokasi permukiman, kondisi lapangan yang sulit dijangkau, serta potensi kerusakan fasilitas PJU akibat faktor cuaca, usia peralatan, maupun gangguan eksternal. Selain itu, meningkatnya kebutuhan penerangan pada kawasan permukiman baru juga menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan PJU.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah kerjasama yang baik antara Dinas PerkimLh dengan penyedia baik dalam pemeliharaan PJU maupun konsultasi serta Adanya pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan kerusakan PJU/PJL.

Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penyusunan prioritas pemasangan PJU pada wilayah yang masih minim penerangan, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia layanan kelistrikan, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin dan preventif guna menjaga keberfungsian PJU secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan peningkatan pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam menjaga fasilitas penerangan lingkungan agar pelayanan PJU dapat terus optimal dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman.

37. Sasaran kinerja Meningkatkan Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja Persentase PSU yang Diserahterimakan memiliki target dan realiasi 3.66% atau capaian 100%. Meskipun target kinerja telah tercapai secara optimal,

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya sasaran ini antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan dibandingkan dengan kebutuhan penambahan titik PJU di wilayah permukiman yang terus berkembang, kendala teknis di lapangan seperti kondisi jaringan listrik dan lokasi pemasangan yang sulit dijangkau, serta adanya potensi kerusakan PJU akibat faktor cuaca maupun vandalisme.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah adanya Target Kinerja, RUP dan RAK, target 20 perumahan terverifikasi.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan perencanaan kebutuhan PJU berbasis prioritas wilayah yang masih minim penerangan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya penyedia jaringan

kelistrikan dalam proses pemasangan dan pemeliharaan, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin dan preventif guna menjaga keberfungsian PJU secara berkelanjutan.

38. Sasaran kinerja tertanganinya rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah diukur dengan indikator Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani memiliki target dan realisasi 100%.

Faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini antara lain keterbatasan waktu penanganan akibat kondisi darurat bencana, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang memerlukan ketelitian tinggi, serta kendala teknis di lapangan seperti aksesibilitas lokasi terdampak dan kesiapan lahan relokasi.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah adanya Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dilakukan perencanaan relokasi yang lebih matang dengan mempertimbangkan aspek kelayakan hunian, ketersediaan infrastruktur dasar, serta keberlanjutan lingkungan guna memastikan masyarakat terdampak memperoleh hunian yang aman dan layak secara berkelanjutan.

39. Sasaran kinerja Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan diukur dengan indikator Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan memiliki target dan realisasi 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya sasaran ini, antara lain adanya perubahan kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, keterbatasan pemahaman sebagian pengembang terhadap ketentuan teknis siteplan, serta potensi keterlambatan dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah adanya 82 Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang disahkan.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui penguatan proses verifikasi dan evaluasi dokumen siteplan sebelum pelaksanaan pembangunan, peningkatan intensitas pengawasan lapangan secara berkala guna

memastikan kesesuaian pembangunan dengan rencana yang telah disetujui, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan kepada pengembang perumahan terkait pemenuhan standar teknis dan ketentuan perizinan.

40. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas jalan lingkungan permukiman sesuai standar diukur dengan persentase titik jalan lingkungan permukiman sesuai standar memiliki target sebesar 26.87% dengan realisasi 29.80% atau capaian 110.90%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini antara lain keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan jalan lingkungan yang cukup luas, kondisi eksisting jalan yang bervariasi sehingga membutuhkan penanganan teknis berbeda, keterbatasan kesiapan lahan pada beberapa lokasi akibat permasalahan status kepemilikan, serta adanya faktor cuaca yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah dengan adanya Penambahan Anggaran pada DPA Perubahan dan dukungan dari berbagai stakeholder yang terkait.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui peningkatan perencanaan prioritas lokasi berbasis tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat dalam penyelesaian kesiapan lahan, optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui penjadwalan pekerjaan yang lebih efektif, serta peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar teknis.

41. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas drainase permukiman sesuai standar diukur dengan persentase titik drainase permukiman sesuai standar memiliki target sebesar 22.30% dengan realisasi 21.94% atau capaian 98.39%. Sasaran kinerja ini diampu oleh 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Faktor penghambat keberhasilan kinerja ini dikarenakan paket pekerjaan drainase pada bidang permukiman tidak dapat terhitung karena Lokasi kegiatan diluar SK kumuh terbaru.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain adanya dukungan program peningkatan infrastruktur permukiman yang terencana dengan baik, koordinasi yang cukup efektif antara perangkat daerah pelaksana dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta komitmen pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase. Adapun

upaya perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian target kinerja antara lain melalui peningkatan ketepatan perencanaan teknis dan penentuan prioritas lokasi penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan dan potensi genangan, penguatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang ditetapkan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia.

42. Sasaran kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman memiliki target dan realisasi 4 dokumen atau capaian 100%. Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah antusiasme Instansi terkait untuk mendukung tersusunnya Dokumen RP3KP sebagai Pedoman dokumen perencanaan strategis untuk mengatur pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman secara terkoordinasi

43. Sasaran kinerja Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar diukur dengan indikator kinerja Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar memiliki target 0.89% dengan realisasi 1.18% atau capaian 132.58%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya sasaran ini antara lain keterbatasan ketersediaan data spasial dan data kondisi eksisting permukiman yang memerlukan proses validasi lebih lanjut, dinamika perubahan kondisi lapangan, serta keterbatasan waktu dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan di beberapa tahapan perencanaan masih perlu ditingkatkan agar dokumen yang disusun semakin komprehensif.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah adanya anggaran tambahan untuk penanganan 115 unit perbaikan rumah tidak layak huni dan 4 unit Pembangunan rumah

baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas dan pemutakhiran basis data permukiman secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar dokumen yang dihasilkan dapat lebih implementatif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan permukiman. Ke depan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem perencanaan berbasis data juga terus ditingkatkan guna mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat dan berkelanjutan

44. Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar diukur dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak memiliki target dan realisasi 35% atau capaian 100%.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya sasaran ini antara lain masih terbatasnya pemahaman teknis sebagian masyarakat mengenai standar konstruksi bangunan yang layak, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menerapkan standar pembangunan secara optimal, serta kebiasaan pembangunan rumah secara bertahap tanpa perencanaan teknis yang memadai. Selain itu, keterbatasan jangkauan sosialisasi pada seluruh wilayah permukiman juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan secara merata.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja ini adalah tercapainya Sosialisasi Peraturan Daerah ke 7 Kecamatan dan 100 orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, penyediaan pendampingan teknis pembangunan rumah layak huni, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam penyebarluasan informasi standar permukiman layak. Selain itu, dilakukan upaya mendorong pemanfaatan program bantuan perumahan dan peningkatan peran masyarakat dalam penerapan pembangunan rumah sesuai standar guna menjaga kualitas hunian yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

45. Sasaran kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi hambatan tercapai kinerja ini adalah adanya keterlambatan pengumpulan data dan bukti dukung serta tidak sesuainya laporan kinerja yang sudah diarahkan dari masing-masing bidang, keterbatasannya waktu penyusunan dokumen yang bersamaan dengan agenda perencanaan lainnya seperti penyusunan laporan kinerja, evaluasi program, dan penyesuaian anggaran, serta kurangnya SDM yang dalam mengelola penyusunan dokumen perencanaan.

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini antara lain tersusunnya mekanisme dan jadwal penyusunan dokumen yang terkoordinasi dengan baik, tersedianya pedoman dan regulasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang jelas, serta meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pengelola perencanaan dan pelaporan. Selain itu, terjalannya koordinasi yang efektif antar bidang dan dengan perangkat daerah terkait, dukungan sistem informasi perencanaan dan pelaporan, serta komitmen pimpinan dan pelaksana dalam memenuhi ketentuan penyusunan dokumen turut mendukung tersusunnya seluruh dokumen perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai standar.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam kinerja ini adalah dengan meningkatkan koordinasi internal antar bidang secara berkala melalui rapat koordinasi dan penetapan jadwal penyampaian data yang jelas, menyusun timeline dan mekanisme kerja yang lebih terstruktur guna memastikan seluruh tahapan penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu.

46. Sasaran kinerja Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi hambatan dalam capaian kinerja adanya keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing bidang atau kegiatan, sehingga dapat mempengaruhi proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan

secara keseluruhan, Proses rekonsiliasi data keuangan yang membutuhkan ketelitian tinggi, terutama dalam memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, sistem aplikasi keuangan, dan realisasi anggaran.

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan

upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pada kinerja ini adalah dengan melakukan Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pengelola keuangan pada setiap bidang, guna memastikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu serta Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan secara berkala, untuk meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat proses penyusunan laporan akhir.

47. Sasaran kinerja Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang dapat menjadi hambatan tercapainya kinerja adanya Perubahan kondisi aset di lapangan, seperti perpindahan penggunaan, kerusakan, maupun penghapusan aset yang belum segera diperbarui dalam sistem pencatatan

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini antara lain tersedianya regulasi dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang jelas, tertibnya pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi aset, serta kompetensi sumber daya manusia pengelola aset yang memadai. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen aset secara optimal, koordinasi yang baik dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta komitmen pimpinan dan pelaksana dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi pelaporan turut mendukung tersusunnya laporan pengelolaan dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengelolaan aset daerah guna meningkatkan akurasi data serta mempermudah proses pelaporan.

48. Sasaran kinerja Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi hambatan tercapainya kinerja ini adalah tingginya volume pekerjaan administrasi, seperti pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pelayanan administrasi perkantoran, dan dukungan kegiatan perangkat daerah yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini antara lain karena sasaran ini merupakan kegiatan rutin.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tercapainya kinerja ini dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran seperti sistem persuratan elektronik dan pengarsipan digital.

49. Sasaran kinerja Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Faktor yang menjadi hambatan tercapainya kinerja ini adalah Proses administrasi pengadaan yang memerlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga membutuhkan waktu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pengadaan.

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini antara lain karena sasaran ini merupakan kegiatan rutin

upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tercapainya kinerja ini adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur pengelolaan pengadaan melalui pelatihan terkait regulasi dan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.

50. Sasaran kinerja Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

faktor yang menjadi penghambat tercapainya kinerja ini antara lain keterbatasan ketersediaan sumber daya pendukung pelayanan, adanya dinamika kebutuhan operasional

perangkat daerah yang berubah secara cepat, serta potensi keterlambatan dalam proses administrasi dan koordinasi pelaksanaan jasa penunjang

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini antara lain karena sasaran ini merupakan kegiatan rutin.

upaya perbaikan yang dapat dilakukan melalui peningkatan perencanaan kebutuhan jasa penunjang secara lebih terukur, penguatan koordinasi antar unit kerja, optimalisasi pengelolaan administrasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan jasa penunjang pelayanan umum tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

51. Sasaran kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas. Target kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

faktor yang dapat menjadi penghambat tercapainya kinerja ini di antaranya keterbatasan anggaran pemeliharaan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang harus dipelihara, usia aset yang sudah cukup lama sehingga membutuhkan penanganan lebih intensif, serta adanya kendala teknis dalam penjadwalan pemeliharaan akibat tingginya intensitas penggunaan fasilitas.

Faktor pendorong atas keberhasilan sasaran ini karena pada sasaran ini antara lain karena sasaran ini merupakan kegiatan rutin.

upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penyusunan prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi aset, peningkatan perencanaan pemeliharaan secara berkala dan preventif, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemeliharaan agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah secara optimal.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4 Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	104.11	93.5	6.50
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	119.30		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	100.89		
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	100.26	95.01	4.99
3	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	93.50	6.50
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	100		
4	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	106.15	99.90	0.10
5	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	73.01	26.99
6	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	67.69	32.31
7	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100	92.49	7.51
8	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	61.74	38.26
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	96.57	3.43
10	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	100	95.20	4.80
11	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100		
12	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	100.26	94.98	5.02
13	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	100.26	93.21	6.79
14	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	100.26	98.96	1.04
15	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	100	93.26	6.74
		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	100		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
16	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	100		
17	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	100		
18	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	100	92.43	7.57
19	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	100	100	0.00
20	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	155.96	89.66	10.34
21	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	101.25		
22	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	106.16	99.90	0.10
23	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	100	73.01	26.99
24	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	100		
25	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100	67.69	32.31
26	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100	92.49	7.51
27	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	100	61.74	38.26
28	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	100	96.57	3.43
29	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	100	95.20	4.80
30	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100		
31	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	100		
32	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	100	94.93	5.07
33	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	110.9	94.98	5.02

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
34	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	100		
35	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	100		
36	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100	99.34	0.66
37	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100	95.77	4.23
38	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	100	91.90	8.10
39	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	110.9	93.34	6.66
41	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	100		
42	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	79.99	20.01
43	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	76.02	23.98
44	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	100	0.00
45	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	90.79	9.21
46	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	93.17	6.83
47	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	98.58	1.42
48	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	76.34	23.66
49	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	92.84	7.16

Sumber : Laporan Emonev Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa rata-rata sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran dari sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam table diatas. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman, telah mencapai kinerja sebesar 100.26 namun dengan realisasi anggaran hanya sebesar 95.01% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Lahan dengan capaian 104.11%, 119.30% dan 100.89% pada ketiga indikator. banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

1. pada indikator **Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu** dan 100% dan indikator **Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu** didukung **program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**. Dalam upaya pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair maupun emisi udara dilakukan secara berkala guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL turut menjadi instrumen pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan usaha dengan aktivitas kegiatan Sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha, melakukan pemantauan kualitas air, dan udara

2. Indikator Persentase Sampah Dibuang Ke TPA didukung **program pengelolaan** sampah dengan target 22.58% dengan realisasi 27.25% dengan capaian 79.31%. Pelaksanaan program pengelolaan sampah dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir melalui sistem pengelolaan sampah terpadu dari sumber hingga tahap pengolahan akhir. Adapun aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator ini meliputi pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju fasilitas pengolahan sampah, pelaksanaan pemilahan sampah di TPS3R antara sampah organik dan anorganik, serta proses pengolahan dan pencacahan sampah menggunakan mesin guna mengurangi volume sampah. Sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan selanjutnya diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Belum tercapainya target kinerja disebabkan oleh masih tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber rumah tangga. Selain itu, keterbatasan kapasitas fasilitas pengolahan sampah dan sarana prasarana operasional persampahan turut mempengaruhi besarnya jumlah sampah residu yang harus dibuang ke TPA.
3. Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik didukung **Program Pengendalian dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)** dengan target 46.43% dengan realisasi 49.29% dan persentase capaian 106.15%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 agar melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendataan dan identifikasi pelaku usaha penghasil limbah B3, pelaksanaan pengawasan terhadap penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah B3, serta pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait tata cara pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar. Selain itu, dilakukan verifikasi dokumen lingkungan hidup serta monitoring kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan pengelolaan limbah B3 secara

berkala. Keberhasilan capaian kinerja juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pengelolaan limbah B3, serta optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

4. Indikator kinerja Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan didukung **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** Target kinerja pada sasaran ini senilai 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%. kegiatan yang menunjang keberhasilan pada program ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pada program ini adalah melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang akan di awasi dan mengikuti bimtek pengembangan kapasitas pejabat lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan didukung **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** Target kinerja pada sasaran ini senilai 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%. adapun aktivitas yang menunjang keberhasilan pada sasaran ini adalah melaksanakan verifikasi lapangan terhadap aduan masyarakat di wilayah kabupaten Banjar. Program ini didukung oleh kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota. Berikut adalah data register kasus pengaduan lingkungan:
6. Indikator persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup tersedia didukung **program Perencanaan Lingkungan Hidup** yang bertujuan untuk memastikan tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Dalam upaya mencapai target kinerja, dilakukan koordinasi, pengumpulan data dan informasi lingkungan hidup, serta penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan

daerah maupun kebijakan nasional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, untuk menjamin kualitas dokumen yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pembahasan teknis, konsultasi dengan perangkat daerah terkait, serta penyempurnaan dokumen melalui proses evaluasi dan verifikasi secara bertahap. Pelaksanaan kegiatan juga disertai pemantauan dan evaluasi oleh perangkat daerah guna memastikan penyusunan dokumen berjalan tepat waktu dan sesuai target yang telah ditetapkan.

7. Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan didukung oleh **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam upaya mencapai target kinerja, dilakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat dalam penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya. Pelaksanaan program tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta partisipasi dalam kegiatan menjaga kualitas lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat peduli lingkungan dapat terus meningkat dan mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lestari.
8. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan diukur dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan didukung oleh **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk**

Masyarakat. Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk memastikan efektivitas program, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan hidup. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada periode berikutnya.

9. Indikator Persentase Tutupan Lahan dan Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau didukung **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)** bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan melalui penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam upaya mencapai target kinerja, dilakukan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah daerah. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi penanaman dan pemeliharaan vegetasi pada kawasan ruang terbuka hijau, rehabilitasi lahan kritis, serta pengayaan jenis tanaman guna meningkatkan tutupan vegetasi dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati memberikan kontribusi terhadap peningkatan luas tutupan lahan hijau serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Ke depan, diperlukan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, peningkatan kegiatan rehabilitasi lahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kawasan ruang terbuka hijau guna mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

10. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Persentase Rumah Layak Huni Target kinerja pada program ini sebesar 76.95% dan realisasi 76.86% atau capaian 99.88% didukung **program pengembangan perumahan**. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar kelayakan

teknis, kesehatan, dan keselamatan bangunan. Program ini dilaksanakan guna mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, aman, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendataan dan identifikasi kondisi rumah masyarakat guna mengetahui tingkat kelayakan hunian, khususnya pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan peningkatan kualitas rumah. Selain itu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan melalui proses evaluasi dan penerbitan perizinan pembangunan agar pembangunan rumah memenuhi ketentuan tata ruang serta standar teknis bangunan gedung.

11. Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal

Indikator Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal didukung **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan target kinerja sebesar 76.95% dan terealisasi 76.86% dengan persentase capaian 99.88%. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Program ini dilaksanakan untuk memastikan kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain pendataan dan identifikasi kondisi permukiman yang belum memiliki kelengkapan PSU minimal, fasilitasi penyediaan prasarana lingkungan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, serta sarana pendukung permukiman lainnya. Selain itu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan melalui evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan standar PSU oleh pengembang perumahan.

12. Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal

Indikator Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal didukung **Program Kawasan Permukiman** dengan target kinerja sebesar 76.95% dan terealisasi 76.86% dengan persentase capaian 99.88%. Pencapaian indikator

tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Program ini dilaksanakan untuk memastikan kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain pendataan dan identifikasi kondisi permukiman yang belum memiliki kelengkapan PSU minimal, fasilitasi penyediaan prasarana lingkungan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, serta sarana pendukung permukiman lainnya. Selain itu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan melalui evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan standar PSU oleh pengembang perumahan.

13. Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal

Indikator Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal didukung **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** dengan target kinerja sebesar 76.95% dan terealisasi 76.86% dengan persentase capaian 99.88%. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Program ini dilaksanakan untuk memastikan kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar yang mendukung kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan antara lain pendataan dan identifikasi kondisi permukiman yang belum memiliki kelengkapan PSU minimal, fasilitasi penyediaan prasarana lingkungan permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, serta sarana pendukung permukiman lainnya. Selain itu dilakukan pengendalian pembangunan perumahan melalui evaluasi dan pengawasan terhadap pemenuhan standar PSU oleh pengembang perumahan.

14. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern

indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern didukung dengan **Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** target nilai 81 terealisasi Kinerja Intern dengan nilai 88.17% dengan persentase capaian 116%. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan penunjang administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja internal, serta peningkatan tertib administrasi perkantoran. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemenuhan dokumen pendukung evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan nilai kepatuhan dan kinerja organisasi.

15. Parameter air yang dipantau 38 dan Parameter Udara Ambien yang Dipantau 3

Indikator **Parameter air yang dipantau dan Parameter Udara Ambien yang Dipantau** didukung kegiatan **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** dengan target 38 dan 3 dan terealisasi 38 dan 3 dengan persentase capaian 100%. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mutu lingkungan serta memastikan kualitas air dan udara tetap memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Aktivitas kegiatan yang dilaksanakan meliputi penentuan lokasi titik pantau kualitas lingkungan, pengambilan sampel air pada badan air, serta pengukuran kualitas udara ambien pada lokasi pemantauan yang telah ditetapkan. Sampel yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium terhadap parameter fisika, kimia, dan biologi air serta parameter kualitas udara ambien guna memperoleh data kondisi lingkungan secara akurat.

16. Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina

Indikator Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina didukung kegiatan **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** dengan target kinerja sebanyak 18 komunitas dan terealisasi sebanyak 18 komunitas dengan persentase capaian 100%. Dalam upaya mencapai target kinerja, dilakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada komunitas masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat masyarakat. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif, seperti pengelolaan sampah, penghijauan lingkungan, konservasi sumber daya air, serta pengendalian pencemaran lingkungan. Selain itu, dilakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kelurahan/desa serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan Program Kampung Iklim berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

17. Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Indikator Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca didukung kegiatan **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** dengan target kinerja sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan dengan persentase capaian 100%. Dalam rangka mencapai target kinerja, perangkat daerah melaksanakan penyusunan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai dasar perencanaan kebijakan pengendalian perubahan iklim di daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pengumpulan data aktivitas sektor penyumbang emisi, verifikasi dan validasi data, serta pengolahan informasi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan pedoman inventarisasi nasional. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

18. Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina

Indikator Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina didukung kegiatan **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** dengan target kinerja sebanyak 18 komunitas dan terealisasi

sebanyak 18 komunitas dengan persentase capaian 100%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi dan penetapan lokasi Kampung Iklim, sosialisasi program kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok melalui pembinaan teknis, serta pendampingan dalam penerapan aksi pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penghijauan lingkungan, konservasi sumber daya air, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

19. Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina

Indikator Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina didukung kegiatan **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** dengan target kinerja sebanyak 18 komunitas dan terealisasi sebanyak 18 komunitas dengan persentase capaian 100%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai bagian dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi komunitas sasaran, sosialisasi program pemulihan lingkungan, pembinaan teknis kepada kelompok masyarakat, serta pendampingan dalam pelaksanaan aksi nyata pemulihan lingkungan seperti rehabilitasi lahan, penanaman vegetasi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, konservasi sumber daya air, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

20. Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif

Indikator Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif didukung kegiatan **Pengelolaan Sampah** dengan target 50% dan terealisasi 77.98% dengan persentase capaian 155.96%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, serta pengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Pelaksanaan kegiatan meliputi

pembinaan dan pendampingan kelembagaan pengelola sampah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah, fasilitasi operasional kegiatan pengelolaan sampah, serta monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan aktivitas kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat.

21. Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah

Indikator Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah didukung kegiatan **Pengelolaan Sampah** dengan target 50% dan terealisasi 34.8% dengan persentase capaian 69.60%. Upaya yang dilakukan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya rumah tangga, dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya. elaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, pembinaan pemilahan sampah rumah tangga, penguatan peran bank sampah dan TPS3R, serta pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku sebagian masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah di tingkat lingkungan, serta belum meratanya keberadaan kelembagaan pengelolaan sampah di seluruh wilayah.

22. Persentase Sampah Yang Dikurangi

Indikator Persentase Sampah Yang Dikurangi didukung kegiatan **Pengelolaan Sampah** dengan target sebesar 32.75% dan terealisasi 33.16% dengan persentase capaian 101.25%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui pelaksanaan pengurangan sampah dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, serta kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan dan penguatan bank sampah serta TPS3R, kegiatan pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah organik dan anorganik,

pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, serta sosialisasi penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) kepada masyarakat. Selain itu, dilakukan pendampingan operasional dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan sampah guna memastikan efektivitas pengurangan timbulan sampah. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah, optimalnya peran kelembagaan pengelolaan sampah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga maupun lingkungan.

23. Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah

Indikator Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah didukung kegiatan **Pengelolaan Sampah (UPTD-Persampahan)** dengan target 54750 ton dan terealisasi 54020 ton dengan persentase capaian 98.76%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui optimalisasi pelayanan pengangkutan dan pemrosesan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) guna memastikan sampah yang dihasilkan masyarakat dapat tertangani secara baik dan sesuai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju TPA, pengoperasian armada persampahan, pengelolaan dan penataan area TPA, serta monitoring volume sampah yang masuk dan tertangani melalui sistem pemrosesan akhir. Selain itu, dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan guna menjaga keberlangsungan operasional pelayanan pengelolaan sampah. penanganan sampah telah terlaksana dengan baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan armada pengangkut, kondisi operasional di lapangan, serta fluktuasi timbulan sampah pada periode tertentu.

24. Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis

Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis didukung kegiatan **Penyimpanan sementara Limbah B3** target

pada indikator ini sebanyak 46.43% dan terealisasi 49.29% dengan persentase capaian 106.16%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis pengelolaan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi ketentuan pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha, fasilitasi penyusunan dokumen rincian teknis dan persetujuan teknis, verifikasi lapangan terhadap sarana penyimpanan sementara Limbah B3, serta monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan Limbah B3. Dengan capaian yang melampaui target, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 telah berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendukung upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah. Ke depan, pengawasan dan pembinaan perlu terus ditingkatkan guna menjaga konsistensi kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan.

25. Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum

Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum didukung kegiatan **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** diukur dengan indikator sebanyak 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Upaya pencapaian target dilakukan melalui pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan lingkungan, pengawasan lapangan terhadap kegiatan usaha, pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban lingkungan, serta tindak lanjut berupa penegakan hukum administratif apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha.

Dengan tercapainya indikator ini, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dinilai telah berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah. Ke depan, kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perlu terus dilaksanakan secara konsisten guna menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

26. Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum

Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum didukung kegiatan **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** diukur dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan meliputi inventarisasi dan penjadwalan pengawasan terhadap pelaku usaha, pemeriksaan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemberian pembinaan teknis, serta tindak lanjut berupa penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran lingkungan. Dengan tercapainya indikator ini, kegiatan pembinaan dan pengawasan dinilai telah berjalan optimal dalam mencegah potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ke depan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan guna mempertahankan tingkat kepatuhan pelaku usaha serta menjaga kualitas lingkungan hidup daerah.

27. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti didukung kegiatan **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** diukur dengan target

sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan meliputi penerimaan dan verifikasi pengaduan masyarakat, penelaahan administrasi laporan, pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap lokasi pengaduan, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut maupun pembinaan kepada pihak yang diadukan. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap penyelesaian pengaduan guna memastikan permasalahan lingkungan dapat ditangani secara tepat dan efektif. Dengan tercapainya indikator ini, penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dinilai telah berjalan optimal dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Ke depan, sistem pengelolaan pengaduan perlu terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelayanan serta mempercepat penyelesaian setiap pengaduan yang diterima.

28. Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana

Indikator Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana didukung kegiatan **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** diukur dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyediakan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terarah dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pengumpulan dan inventarisasi data lingkungan hidup, penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, penyusunan dokumen RPPLH, serta pembahasan dan penyempurnaan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan sinkronisasi dokumen RPPLH dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna memastikan aspek lingkungan

hidup menjadi bagian dalam kebijakan pembangunan. Dengan tercapainya indikator ini, dokumen RPPLH Kabupaten/Kota telah tersedia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Ke depan, dokumen RPPLH diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

29. Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat

Indikator Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat didukung kegiatan **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH** diukur dengan target 1 kelompok dan terealisasi 1 kelompok dengan persentase capaian 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokalnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat, fasilitasi proses verifikasi dan validasi kelembagaan adat, koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta pendampingan dalam proses penetapan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan sosialisasi terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Dengan tercapainya indikator ini, keberadaan masyarakat hukum adat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berkelanjutan. Ke depan, diperlukan pembinaan lanjutan guna memperkuat kapasitas masyarakat hukum adat dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

30. Persentase Sekolah Yang Terbina

Indikator Persentase Sekolah Yang Terbina didukung kegiatan **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** diukur dengan indikator 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh sekolah yang menjadi sasaran telah memperoleh

pembinaan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang efektif antara perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dan pihak sekolah, serta perencanaan kegiatan yang sistematis dan terjadwal. Selain itu, dukungan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta komitmen pelaksana kegiatan turut berkontribusi terhadap optimalnya pelaksanaan program.

31. Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola

Indikator Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola didukung kegiatan **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** diukur target seluas 7.82 ha dan terealisasi 7.82 ha dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh luasan lahan yang direncanakan untuk dikelola telah terlaksana sesuai target. Keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan kegiatan yang konsisten dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Upaya seperti inventarisasi potensi hayati, penataan kawasan, pemeliharaan habitat, serta pengawasan terhadap ancaman kerusakan menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya target luasan pengelolaan. Meskipun capaian telah mencapai 100% secara kuantitatif, evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kualitas pengelolaan lahan, termasuk kondisi ekosistem, tingkat keberlanjutan pengelolaan, serta dampaknya terhadap pelestarian spesies dan keseimbangan lingkungan. Selain itu, penguatan aspek partisipasi masyarakat dan monitoring berkala juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan yang telah dikelola.

32. Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau

Indikator Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau didukung kegiatan **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** diukur dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh area RTH yang menjadi sasaran telah memiliki tutupan lahan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan

ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penanaman vegetasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengawasan terhadap kondisi fisik dan ekologis kawasan RTH. Selain itu, perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen tata ruang serta koordinasi antar perangkat daerah turut memperkuat pencapaian target. Walaupun capaian secara kuantitatif telah mencapai 100%, evaluasi kualitasutupan lahan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi vegetasi dalam keadaan sehat, beragam, dan mampu memberikan fungsi ekologis secara optimal, seperti penyerapan karbon, pengendalian banjir, peningkatan kualitas udara, dan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati. Penguatan monitoring berkala dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan RTH juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi ruang terbuka hijau.

33. Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten

Indikator ini didukung kegiatan **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** diukur dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berhasil dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang terstruktur, ketersediaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta komitmen pelaksana kegiatan dalam menjaga kelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Meskipun secara kuantitatif capaian telah mencapai 100%, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas ekosistem, perlindungan habitat, serta keberlanjutan fungsi lingkungan. Penguatan aspek monitoring, pelaporan berbasis hasil, dan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian di tahun-tahun mendatang.

34. Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar

Indikator Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar didukung kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** diukur dengan target 26.87%

dan terealisasi 29.8% dengan persentase capaian 110.90%. Capaian yang melebihi target ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan permukiman yang melampaui perencanaan awal. Keberhasilan tersebut didukung oleh percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, optimalisasi anggaran, serta koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, adanya prioritas penanganan pada titik-titik jalan yang belum memenuhi standar turut mendorong peningkatan persentase capaian. Meskipun capaian telah melampaui target, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh titik jalan yang telah dinyatakan sesuai standar benar-benar memenuhi aspek teknis, seperti kualitas konstruksi, ketahanan terhadap beban dan cuaca, serta sistem drainase pendukung. Pengawasan dan pemeliharaan berkala juga menjadi faktor penting agar kualitas jalan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

35. Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar

Indikator Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar didukung kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** diukur dengan target 22.30% dan terealisasi 21.94% dengan persentase capaian 98.39%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih sebesar 0,36% dari rencana awal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, kendala teknis di lapangan, penyesuaian anggaran, maupun faktor cuaca yang mempengaruhi proses pembangunan atau rehabilitasi drainase. Meskipun belum mencapai 100%, realisasi sebesar 98,39% tetap menunjukkan kinerja yang baik karena sebagian besar titik drainase yang direncanakan telah memenuhi standar teknis. Hal ini berdampak positif terhadap pengurangan genangan air, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

36. Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru

Indikator Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru didukung kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** diukur dengan target 20 dokumen dan terealisasi 20 terealisasi dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana pemeliharaan dan pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan teknis yang matang, ketersediaan anggaran, serta koordinasi yang efektif antara pelaksana kegiatan dan pihak terkait di lapangan. Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat di lingkungan permukiman. Meskipun capaian telah mencapai 100%, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh titik PJU yang dipelihara maupun dipasang baru berfungsi optimal, memiliki kualitas instalasi yang sesuai standar, serta didukung dengan sistem pemeliharaan berkelanjutan. Monitoring berkala dan respons cepat terhadap kerusakan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan layanan penerangan jalan.

37. Persentase PSU yang Diserahterimakan

Indikator Persentase PSU yang Diserahterimakan didukung kegiatan **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** diukur dengan target 3.66% dan realisasi 3.66% dengan persentase capaian 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh PSU perumahan yang direncanakan untuk diserahterimakan kepada pemerintah daerah telah terlaksana sesuai target. Keberhasilan ini didukung oleh proses administrasi yang tertib, kelengkapan dokumen serah terima, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pihak pengembang perumahan. Selain itu, pemenuhan persyaratan teknis dan legalitas aset menjadi faktor penting dalam memperlancar proses penyerahan. Meskipun target telah tercapai sepenuhnya, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh PSU yang diterima berada dalam kondisi baik dan sesuai standar teknis. Ke depan, diperlukan penguatan pendataan, percepatan proses administrasi, serta

peningkatan koordinasi agar cakupan PSU yang diserahterimakan dapat terus meningkat dan mendukung tertib pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan.

38. Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani

Indikator Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani didukung kegiatan **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** diukur dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rumah yang menjadi sasaran penanganan telah tertangani sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh pendataan yang akurat, verifikasi lapangan yang tepat sasaran, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam proses penyediaan maupun rehabilitasi rumah. Dengan demikian, capaian 100% pada indikator ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam penanganan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.

39. Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan

Indikator Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan didukung kegiatan **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** diukur dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pembangunan perumahan yang menjadi objek pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan siteplan yang telah disahkan. Keberhasilan ini didukung oleh proses verifikasi dokumen perizinan yang cermat, pengawasan lapangan yang konsisten, serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pengembang perumahan. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan regulasi teknis menjadi faktor penting dalam menjaga kesesuaian pembangunan. Meskipun target telah tercapai sepenuhnya, evaluasi dan pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi

kepatuhan di masa mendatang. Penguatan sistem monitoring serta peningkatan transparansi proses perizinan menjadi langkah strategis dalam mempertahankan capaian ini. Dengan demikian, capaian 100% pada indikator ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam pengendalian pembangunan perumahan sesuai siteplan, sekaligus mendukung terwujudnya kawasan hunian yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

40. Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman

Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman didukung kegiatan **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** diukur target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan yang menjadi sasaran telah disusun sesuai dengan target. Keberhasilan ini didukung oleh proses pengumpulan data yang akurat, analisis kebutuhan lapangan, serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, tim perencana, dan masyarakat setempat. Penyusunan dokumen perencanaan yang lengkap menjadi dasar penting untuk pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara efektif. Meskipun target telah tercapai sepenuhnya, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan, relevansi data, dan kesesuaian rekomendasi teknis dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, capaian 100% pada indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam penyusunan dokumen perencanaan, sekaligus menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh secara berkelanjutan.

41. Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar

Indikator Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar didukung kegiatan **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** diukur dengan target 26.87 Ha dan terealisasi 29.8 Ha dengan persentase capaian 110.90%. Capaian yang melebihi target ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan permukiman yang melampaui rencana awal. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan pembangunan yang efektif, optimalisasi anggaran, serta koordinasi

yang baik antara pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat setempat. Penanganan titik-titik jalan yang sebelumnya tidak sesuai standar turut mendorong peningkatan persentase capaian.

42. Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar

Indikator Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar didukung kegiatan **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** diukur target 22.30% dan terealisasi 21.98% dengan persentase capaian 98.39%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar titik drainase yang direncanakan telah memenuhi standar teknis, meskipun terdapat selisih kecil sebesar 0,32% dari target. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, kondisi topografi, atau keterbatasan waktu pelaksanaan.

43. Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar

Indikator persentase RTLH yang ditangani sesuai standar didukung kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** diukur target 0.89% dan terealisasi 0.47% dengan persentase capaian 52.81%. Capaian sebesar 52,81% menunjukkan bahwa lebih dari setengah RTLH yang menjadi sasaran telah ditangani sesuai standar, namun realisasi masih jauh dari target. Rendahnya capaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, kendala teknis di lapangan, proses verifikasi data RTLH yang memakan waktu, atau kesulitan dalam koordinasi dengan masyarakat penerima manfaat. Meskipun capaian belum optimal, penanganan RTLH yang telah dilakukan tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan capaian di periode berikutnya, diperlukan percepatan pelaksanaan program melalui perencanaan yang lebih realistis, penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan berkala, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan perbaikan rumah.

44. Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak

Indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak didukung kegiatan **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

pada Daerah Kabupaten/Kota diukur target 35% dan terealisasi 35% dengan persentase capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat sasaran telah memperoleh pemahaman mengenai standar permukiman layak sesuai dengan program yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang terstruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan edukasi terkait permukiman layak.

9. Rekomendasi dan Tindak lanjut.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada <https://esakip.banjarkab.go.id> dan <https://esr.menpan.go.id>
2. Melakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan analisis yang memadai, dan data yang andal serta memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) sebagai dasar dalam penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
3. Melakukan internalisasi SAKIP kepada setiap Pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.
5. Melakukan reuiu berjenjang terhadap pelaporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta memastikan laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai kinerja berikutnya;
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melibatkan seluruh anggota Tim Evaluasi Internal dan dilakukan secara mendalam, berjenjang dan berkelanjutan.

Tindak Lanjut

- 1) Akan melakukan publikasi terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tepat waktu pada laman ESR MENPAN dan E-SAKIP Banjarkab.
- 2) Akan dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang terstandar
- 3) Melaksanakan rapat internal sakip secara berjenjang (perbidang)
- 4) Mengusulkan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan atau penempatan jabatan berdasarkan capaian kinerja aktual.
- 5) Meningkatkan kualitas revidi laporan kinerja dengan menambahkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan serta melaksanakan revidi berjenjang.
- 6) Melakukan pemantauan rencana aksi secara rutin (bulanan) dan melakukan perubahan strategi jika rencana aksi tidak berjalan sesuai harapan

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan.

- Realisasi Jenis Belanja

Tabel 3.5 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Operasi a. Belanja Pegawai	Rp15,429,975,000	Rp11,654,902,532	75.53
2	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp68,920,650,741	Rp62,191,115,189	90.24
	c. Belanja Hibah Belanja Modal	Rp52,202,521,630	Rp49,065,523,657	93.99

Sumber : SIPD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1,137,806,600	Rp1,075,942,190	94.56
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp32,534,760,236	Rp29,169,954,664	89.66
3	Program Pengendalian dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp132,945,000	Rp132,810,350	99.90
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp357,660,500	Rp261,119,992	73.01
5	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp126,784,700	Rp85,820,350	67.69
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp132,928,700	Rp122,947,850	92.49
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kaerifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp120,013,600	Rp74,091,790	61.74
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp223,942,720	Rp216,251,270	96.57
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp17,093,014,015	Rp16,272,274,192	95.20
10	Program Pengelolaan Persampahan (UPTD - Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Rp11,812,261,480	Rp11,212,789,694	94.93
11	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD - Laboratorium Lingkungan)	Rp409,999,300	Rp371,317,309	90.57

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp41,728,396,812	Rp39,631,758,465	94.98
13	Program Pengembangan Perumahan	Rp345,712,500	Rp337,825,650	97.72
14	Program Kawasan Permukiman	Rp7,468,055,782	Rp6,960,764,651	93.21
15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp3,480,820,700	Rp3,444,663,520	98.96
16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp22,634,459,726	Rp17,907,489,961	79.12
17	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp1,280,586,300	Rp1,194,240,619	93.26
18	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp187,694,600	Rp173,493,880	92.43
19	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp79,525,000	Rp79,525,000	100.00
20	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD - Laboratorium Lingkungan)	Rp409,999,300	Rp371,317,309	90.57
21	Pengelolaan Sampah	Rp32,534,760,236	Rp29,169,954,664	89.66
22	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp132,945,000	Rp132,810,350	99.90
23	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp357,660,500	Rp261,119,992	73.01
24	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp126,784,700	Rp85,820,350	67.69
25	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Rp132,928,700	Rp122,947,850	92.49

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
26	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp120,013,600	Rp74,091,790	61.74
27	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp223,942,720	Rp216,251,270	96.57
28	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp17,093,014,015	Rp16,272,274,192	95.20
29	Pengelolaan sampah (UPTD - Pengelolaan Sampah dan Air Limbah)	Rp11,812,261,480	Rp11,212,789,694	94.93
30	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp41,728,396,812	Rp39,631,758,465	94.98
31	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp188,466,000	Rp187,223,100	99.34
32	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	
33	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp157,246,500	Rp150,602,550	95.77
34	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp693,000,785	Rp636,850,803	91.90
35	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp6,775,054,997	Rp6,323,913,849	93.34
36	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp3,480,820,700	Rp3,444,663,520	98.96
38	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp81,538,400	Rp65,222,500	79.99

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
39	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp15,770,611,300	Rp11,988,309,332	76.02
40	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp3,499,700	Rp3,499,700	100.00
41	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp140,373,800	Rp127,441,340	90.79
42	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1,180,231,000	Rp1,099,576,984	93.17
43	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1,169,968,000	Rp1,153,305,846	98.58
44	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3,097,008,526	Rp2,364,228,331	76.34
45	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1,191,229,000	Rp1,105,905,928	92.84

Sumber : SIPD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Realisasi anggaran untuk mewujudkan sasaran kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	71.96	74.92	104.11	Rp64,082,116,851	Rp1,075,942,190	94.56
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	71.21	84.95	119.3			
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	70.73	71.36	100.89			
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Perumahan Layak Huni	53.98	54.12	100.26	Rp53,022,985,794	Rp50,375,012,287	95.01%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82.81	76.82	92.77	Rp22,634,459,726	Rp17,907,489,961	79.12
4	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	100	100	Rp1,137,806,600	Rp261,119,992	73.01
		Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	100	100	100			
5	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	22.58	41.40	16.65	Rp32,534,760,236	Rp29,169,954,664	89.66
6	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	46.43	49.29	106.15	Rp132,945,000	Rp132,810,350	99.90
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	100	100	Rp357,660,500	Rp261,119,992	73.01
8	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100	100	100	Rp126,784,700	Rp85,820,350	67.69
9	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100	100	100	Rp132,928,700	Rp122,947,850	92.49

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	100	100	Rp120,013,600	Rp74,091,790	61.74
11	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100	100	100	Rp223,942,720	Rp216,251,270	96.57
12	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	0.40	0.4	100	Rp17,093,014,015	Rp16,272,274,192	95.2
13	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	17.09	17.09	100			
14	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	54.60	54.74	100.26	Rp41,728,396,812	Rp39,631,758,465	94.98
15	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	76.95	76.86	99.88	Rp345,712,500	Rp337,825,650	97.72
16	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	54.60	54.74	100.26	Rp7,468,055,782	Rp6,960,764,651	93.21
17	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	54.60	54.74	100.26	Rp3,480,820,700	Rp3,444,663,520	98.96
18	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	81	89.25	110.19	Rp22,634,459,726	Rp17,907,489,961	79.12
19	Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA	Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	22.58	41.40	16.65	Rp11,812,261,480	Rp11,212,789,694	94.93
20	Meningkatnya Upaya Pengendalian	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	100	100	Rp409,999,300	Rp371,317,309	90.57
21	Pencemaran/dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu	100	100	100			
22		Parameter Air yang Dipantau	38	38	100	Rp1,280,586,300	Rp1,194,240,619	93.26

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Udara Ambien yang Dipantau	3	3	100			
24	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	18	100			
25	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	1	100			
26	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	38	38	100	Rp409,999,300	Rp371,317,309	90.57
27		Parameter Udara Ambien yang Dipantau	3	3	100			
28	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	18	100	Rp187,694,600	Rp173,493,880	92.43
29	Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	18	18	100	Rp79,525,000	Rp79,525,000	100
30	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	50	78	155.96	Rp32,534,760,236	Rp29,169,954,664	89.66
31	Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	50	35	69.6			
32	Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	32.75	33	100.8			
33	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	46.43	49.29	106.16	Rp132,945,000	Rp132,810,350	99.9
34	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	100	100	100	Rp357,660,500	Rp261,119,992	73.01
35	Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	100	100	100			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	Rp126,784,700	Rp85,820,350	67.69
37	Tersedianya Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100	100	100	Rp132,928,700	Rp122,947,850	92.49
38	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	1	1	100	Rp120,013,600	Rp74,091,790	61.74
39	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	100	100	100	Rp223,942,720	Rp216,251,270	96.57
40	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	7.82	7.82	100	Rp17,093,014,015	Rp16,272,274,192	95.2
41	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100	100	100			
42	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	100	100	100			
43	Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	54750	54750	100	Rp11,812,261,480	Rp11,212,789,694	94.93
44	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	29.8	110.9	Rp41,728,396,812	Rp39,631,758,465	94.98
45	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	21.94	98.39			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	20	20	100			
47	Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan	3.66	3.66	100			
48	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100	100	100	Rp188,466,000	Rp187,223,100	99.34
49	Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	N/A	N/A	N/A	Rp0		
50	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100	100	100	Rp157,246,500	Rp150,602,550	95.77
51	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	4	4	100	Rp693,000,785	Rp636,850,803	91.90
52	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	26.87	29.8	110.9	Rp6,775,054,997	Rp6,323,913,849	93.34
53	Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	22.30	21.94	98.39			
54	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	0.89	1.18	132.58	Rp3,480,820,700	Rp3,444,663,520	98.96
55	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	35	35	100			
56	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan	100	100	100	Rp81,538,400	Rp65,222,500	79.99

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan						
57	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	100	Rp15,770,611,300	Rp11,988,309,332	76.02
58	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100	100	100	Rp3,499,700	Rp3,499,700	100.00
59	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100	100	100	Rp140,373,800	Rp127,441,340	90.79
60	Lancarnya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100	100	100	Rp1,180,231,000	Rp1,099,576,984	93.17
61	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	Rp1,169,968,000	Rp1,153,305,846	98.58
62	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100	100	100	Rp3,097,008,526	Rp2,364,228,331	76.34
63	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100	100	100	Rp1,191,229,000	Rp1,105,905,928	92.84

Sumber : Laporan EMonev Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar 2025

Bab IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kumuh dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar kepada Bupati Banjar dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2025), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 berhasil, hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam struktur organisasi sehingga berpengaruh pada indikator kinerja yang dicapai untuk menunjang program RPJMD Kabupaten Banjar dimana di Tahun 2024 sesuai dengan urusan wajib perumahan dan permukiman serta lingkungan hidup ada 2 sasaran strategis utama dan 1 sasaran strategi pendukung (sekretariat).
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM), kondisi cuaca ekstrim dan perbedaan harga pasar barang dengan yang direncanakan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sangat memerlukan tenaga teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana manusia merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan tugas, koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak yang berkompetensi.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan pembangunan perlu adanya koordinasi dan dukungan dari instansi terkait dan pejabat yang berwenang guna tercapainya sinergi pembangunan.
2. Guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengikutserta dalam kegiatan Bimtek dan Diklat di bidang perumahan dan permukiman dalam setiap kesempatan.
3. Perlunya pendataan resmi oleh badan/Lembaga yang akuntabel terhadap data-data, terutama data jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan, data jumlah rumah (layak

huni dan tidak layak huni) yang ada di Kabupaten Banjar diperlukan dalam proses pembangunan.

4. Untuk terintegrasinya penanganan kumuh agar tidak bersifat parsial maka perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat khususnya dalam hal pendanaan, disamping itu perlunya program yang secara khusus menangani wilayah Kawasan permukiman kumuh.
5. Perlunya penambahan Ruang Terbuka Hijau untuk meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau.
6. Perlunya penambahan sara dan prasarana khususnya dalam penanganan persampahan agar sampah dapat terangkut dan terkelola baik dan maksimal.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lampiran

1. Pohon kinerja dan cascading
2. PK tahun 2024